



INDONESIA
MEMBER OF FATF Since OCT 2023
GLOBAL STANDARD - SETTER
FOR AML - CTF - CPF

p-ISSN 2986-0849

BULETIN STATISTIK

Anti Pencucian
Uang dan
Pencegahan
Pendanaan
Terorisme
(APUPPT) serta
Pendanaan
Proliferasi
Senjata
Pemusnah
Massal
(PPSPM)

CORRUPTION

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Januari 2025
Vol. 13, No. 1

Ringkasan Eksekutif

Januari 2025

Laporan yang diterima oleh PPATK

3.357.618

▼ -1,8%
m-to-m

▲ 3,2%
y-on-y



2.969.849
LTKL

m-on-m -3,0%

y-on-y 4,0%



361.770
LTKT

10,0%

-3,5%



14.259
LTKM

-6,8%

20,6%



8.146
LTPBJ

-33,8%

-28,8%



2.677
LPUT

0,0%

233,4%



917
LPT

-1,1%

1289,4%

79

Hasil Analisis (HA)

m-to-m y-on-y

▼ -32,4%
m-to-m

▲ 15,0%
y-on-y

HA Proaktif
-11,2%

23

HA Inquiry
64,6%

56

▲ 1,8%
m-to-m

▲ 100,0%
y-on-y

41 Informasi

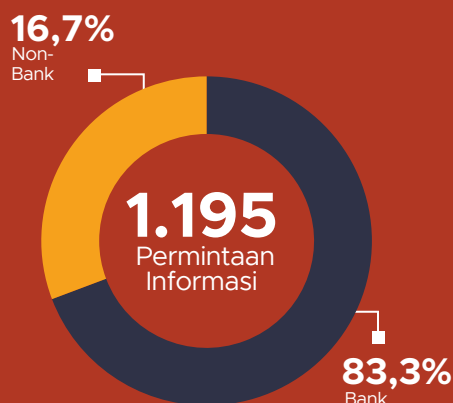
3 HA Terkait
Tindak Pidana
Pendanaan
Terorisme

2 Hasil
Pemeriksaan
(HP)

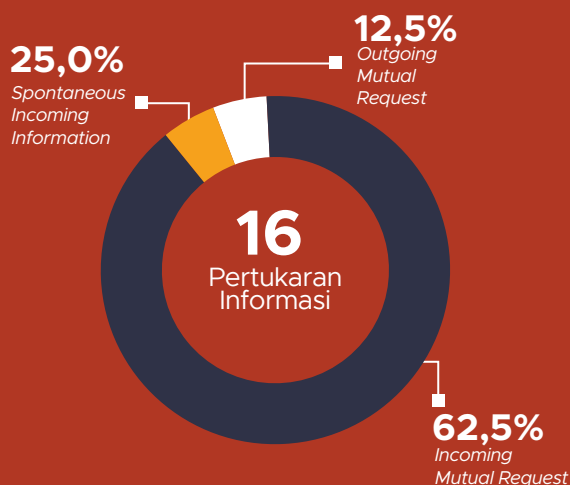
Ringkasan Eksekutif

Januari 2025

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Januari 2025, PPATK melakukan 1.195 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (996 informasi/ 83,3%)



Dari 16 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

15 Keterangan Ahli

Pada Januari 2025, terdapat 15 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (10 keterangan/66,7%)

14 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Januari 2025, berasal dari 6 pengaduan individu dan 8 pengaduan lembaga

2 Diklat APUPPT

Terdapat 2 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Januari 2025

1 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 1 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Januari 2025

0 Audit

Tidak terdapat kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Januari 2025

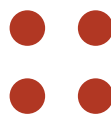
42.630 Pihak Pelapor

Terdapat 42.630 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Januari 2025

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

Ringkasan Eksekutif



Periode 2003 s.d. 2010



8.631.423
LTKL



63.924
LTKM



8.695.347
TOTAL

Periode 2010 s.d. Jan 2021



183.707.334
LTKL



24.708.986
LTKT



514.210
LTKM



309.785
LTPBJ



21.823
LPUT



3.107
LPT



209.265.245
TOTAL

Periode Feb 2021 s.d. Jan 2025



109.427.563
LTKL



13.354.574
LTKT



445.481
LTKM



388.629
LTPBJ



23.146
LPUT



5.543
LPT



123.644.936
TOTAL

Periode 2003 s.d. Jan 2025



293.134.897
LTKL



46.694.983
LTKT



1.023.615
LTKM



698.414
LTPBJ



44.969
LPUT



8.650
LPT



341.605.528
TOTAL



Kata Pengantar

**BULETIN STATISTIK
ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME SERTA PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH
MASSAL**

Januari 2025

Statistics AML/CFT January 2025

ISSN: 2986-0849

Ukuran Buku/Book Size :
B5 (17.5 x 25.5 cm)

Jumlah Halaman/Number of Pages :
ix + 84 halaman/pages

Naskah/Manuscript:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK)/ Indonesian
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC)

Penyunting/Editor :
Direktorat Pelaporan/Directorate of
Reporting

Desain Sampul/Cover Design :
Direktorat Pelaporan/Directorate of
Reporting

Diterbitkan oleh/Published by:
© Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)/
Indonesian Financial Transaction
Reports and Analysis Center (INTRAC)

Sumber Ilustrasi/Graphics by :
freepik.com, flaticon.com, vecteezy.com

Dilarang mengumumkan,
mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian
atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari PPATK

*Prohibited to announce, distribute,
communicate, and/or copy part or all
of this book for commercial purpose
without permission from Indonesian
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC)*

Buletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT).

Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Januari 2025, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 79 HA dengan 23 HA Proaktif dan 56 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Korupsi (22 HA/27,9%) serta 2 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Januari 2025 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 3.357.618 laporan dan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -1,8%. Penurunan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Desember 2024) terjadi pada penerimaan Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa (LTPBJ) yaitu sebesar -33,8% dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebesar -6,8%.

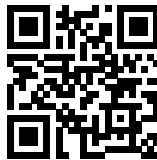
Jakarta, Februari 2025
Kepala PPATK



IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 13, No. 1, 2025

- iii Ringkasan
Eksekutif
- vii Kata Pengantar
- ix Daftar Isi

1

LAPORAN TRANSAKSI

- 1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- 15 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- 23 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)
- 27 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ)
- 31 Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)
- 37 Laporan Penundaan Transaksi (LPT)

41

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

- 41 Hasil Analisis (HA)
- 47 Hasil Pemeriksaan (HP)
- 49 Informasi
- 53 Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor/Instansi
Terkait
- 57 Pertukaran Informasi Antar FIU

59

LAIN-LAIN

- 59 Putusan Pengadilan Terkait TPPU/TPPT
- 63 Keterangan Ahli
- 65 Pihak Pelapor GoAML
- 69 Audit Kepatuhan
- 73 Dokumen Kerja Sama
- 75 Pendidikan & Pelatihan APUPPT
- 79 Pengaduan Masyarakat



TIM PENYUSUN

Pengarah

Fithriadi

Penanggung Jawab

Patrick Irawan

Penyunting

Yudi Aditia; Ratih Putri Pertiwi

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Novie Eriska Aritonang; Ari Utami; Yoyong
Octariyandy; Maria Sasanda

Kontributor Data

Direktorat Pelaporan;
Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III;
Direktorat Hukum dan Regulasi;
Direktorat Pengawasan Kepatuhan PJK;
Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJP;
Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri;
Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT;
Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Januari 2025

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai sejak Januari Tahun 2003

Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPATK

14.259 LTKM

Dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta Profesi melalui sistem goAML

Rata-rata penerimaan LTKM

713 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



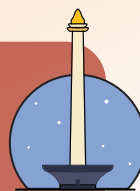
Kepulauan Riau

0,4%



DKI Jakarta

98,2%



Mayoritas
LTKM pada
Januari 2025

Pelaporan
LTKM bulan ini

▼ -6,8%

Dibandingkan bulan
Desember 2024 (*m-to-m*)

▲ 20,6%

Dibandingkan bulan
Januari 2024 (*y-on-y*)

Indikasi Tindak Pidana mayoritas
pada Januari 2025

Perjudian
44,8%

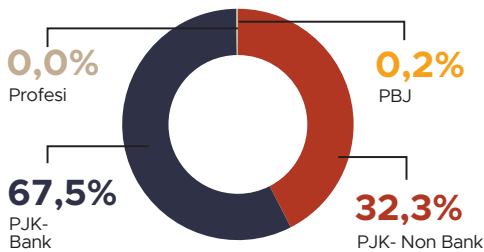


Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

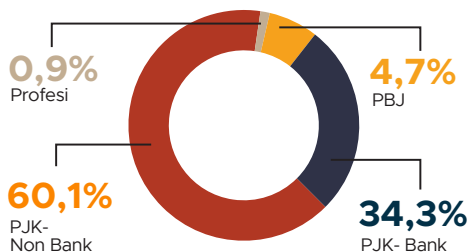
Laporan	2024												2025
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	11.364	8.653	7.620	6.130	7.453	8.930	10.676	10.162	9.941	15.493	12.170	13.214	13.343
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	4	11	2	2	29	1	3	15	0	8	1	1	3
LTKM - Atas Permintaan PPATK	228	311	572	196	227	220	370	1.083	1.055	1.279	1.603	1.061	253
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	7	-	-	5	4	-	2	-	3	-	-	2
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	227	142	239	199	259	312	957	552	691	1.243	597	1.017	658

Catatan:
*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Peraturan PPATK No 1 Tahun 2021

Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2025 (s.d Januari 2025)



Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d Januari 2025)



**UU No. 8
Tahun 2010**
Pasal (1) Ayat 5

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

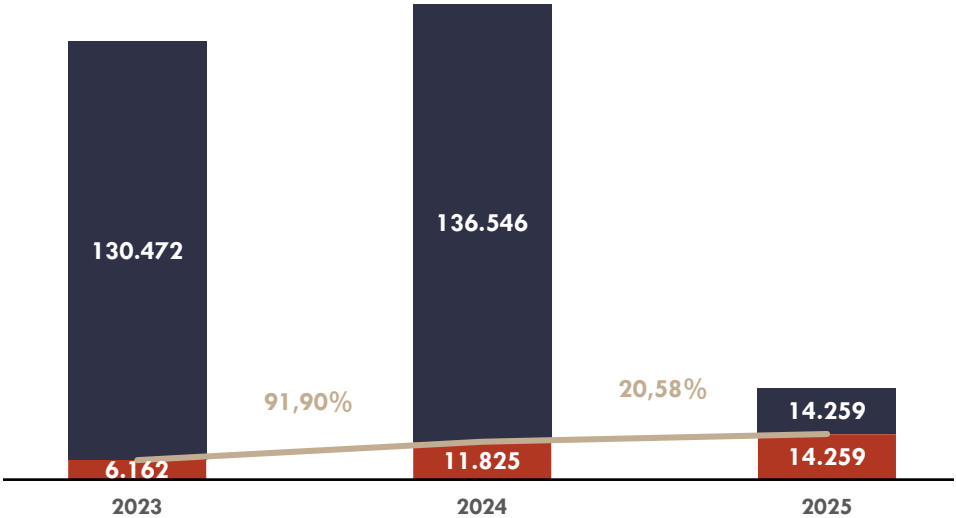
Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri*

Kelompok Industri ¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Jan 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	4.528	58.756	6.031	94.759	9.621	80
Bank Umum	4.512	58.590	6.012	94.533	9.593	75
Bank Asing	83	1.095	129	2.564	71	8
Bank Campuran	30	408	26	387	8	1
Bank Milik Negara	1.156	12.840	1.206	14.822	1.213	4
Bank Pembangunan Daerah	78	1.123	142	2.170	128	18
Bank Swasta	3.165	43.124	4.509	74.590	8.173	44
Bank Perkreditan Rakyat	16	166	19	226	28	5
Non Bank	1.603	71.364	5.786	41.537	4.601	140
Perusahaan Pembiayaan	160	2.181	270	4.745	305	21
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	206	3.905	198	3.742	384	22
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	15	97	12	81	6	2
Perusahaan Efek	59	1.044	105	2.754	240	16
Manajer Investasi	8	91	78	1.145	96	7
Kustodian	-	-	-	7	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	447	6.500	499	8.242	1.293	39
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	50	10.963	4.051	9.113	702	6
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	19	-	10	-	-
Pegadaian	13	129	11	110	8	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	81	41.083	171	4.424	1.036	9
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	562	5.283	382	5.587	527	14
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	2	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	1	69	9	1.574	4	3
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	1	-	-

Kelompok Industri ^{*)}	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Jan 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PBJ	23	319	6	206	35	11
Profesi	8	33	2	44	2	2
Total	6.162	130.472	11.825	136.546	14.259	233

Catatan:
 *) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir s.d Januari 2025



Tabel 3. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri ^{*)}	2024						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bank	6.031	5.740	5.746	4.826	5.875	6.310	9.236
Bank Umum	6.012	5.718	5.736	4.817	5.869	6.297	9.213
Bank Asing	129	224	327	316	373	160	160
Bank Campuran	26	21	23	20	19	62	101
Bank Milik Negara	1.206	1.017	1.065	985	943	1.126	1.521
Bank Pembangunan Daerah	142	151	109	167	166	222	231
Bank Swasta	4.509	4.305	4.212	3.329	4.368	4.727	7.200
Bank Perkreditan Rakyat	19	22	10	9	6	13	23
Non Bank	5.786	3.378	2.673	1.699	2.087	3.134	2.738
Perusahaan Pembiayaan	270	234	300	191	164	251	360
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	198	244	195	183	166	156	351
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	12	2	5	10	-	6	6
Perusahaan Efek	105	89	126	100	122	1.007	165
Manajer Investasi	78	87	132	61	87	84	106
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	499	532	577	500	540	770	688
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	4.051	1.435	646	185	264	190	163
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	4	-	-	4	-	-
Pegadaian	11	7	9	8	7	6	10
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	171	314	401	114	190	52	284
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	382	419	260	347	542	586	530
Perusahaan Modal Ventura	-	1	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	9	9	22	-	1	26	75
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	1	-	-	-	-	-
PBJ	6	4	5	1	9	21	28
Profesi	2	2	9	1	2	2	4
Total	11.825	9.124	8.433	6.527	7.973	9.467	12.006

Catatan:

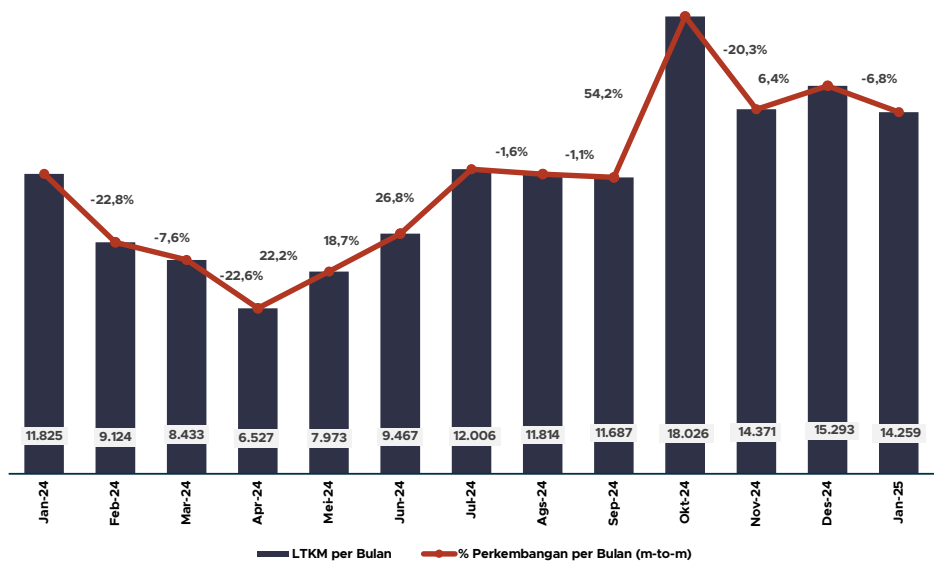
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2024					2025
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bank	8.769	8.165	13.358	10.157	10.546	9.621
Bank Umum	8.743	8.149	13.337	10.128	10.514	9.593
Bank Asing	341	153	110	122	149	71
Bank Campuran	43	18	19	15	20	8
Bank Milik Negara	1.306	1.615	1.393	1.370	1.275	1.213
Bank Pembangunan Daerah	142	135	217	209	279	128
Bank Swasta	6.911	6.228	11.598	8.412	8.791	8.173
Bank Perkreditan Rakyat	26	16	21	29	32	28
Non Bank	3.012	3.494	4.631	4.192	4.713	4.601
Perusahaan Pembiayaan	389	346	1.326	492	422	305
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	602	484	392	332	439	384
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	13	3	5	9	10	6
Perusahaan Efek	168	296	183	230	163	240
Manajer Investasi	125	78	138	91	78	96
Kustodian	7	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	677	959	959	670	871	1.293
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	333	202	302	318	1.024	702
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	1	-	-	-	-
Pegadaian	13	4	14	9	12	8
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	390	299	378	741	1.090	1.036
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	290	471	724	568	468	527
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	4	351	210	732	135	4
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
PBJ	25	25	36	16	30	35
Profesi	8	3	1	6	4	2
Total	11.814	11.687	18.026	14.371	15.293	14.259

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun Terakhir



Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri*)

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	608.932	6.869.506	516.746	6.721.366	523.101
Bank Umum	608.880	6.869.026	516.707	6.721.018	523.065
Bank Asing	2.705	12.641	2.471	16.035	1.315
Bank Campuran	242	11.298	916	4.835	726
Bank Milik Negara	50.908	1.403.050	19.315	767.415	28.347
Bank Pembangunan Daerah	18.117	93.376	3.282	83.210	4.025
Bank Swasta	536.908	5.348.661	490.723	5.849.523	488.652
Bank Perkreditan Rakyat	52	480	39	348	36
Non Bank	32.928	2.226.211	499.845	3.803.370	221.885
Perusahaan Pembiayaan	211	3.044	298	36.946	339
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	413	7.637	506	9.510	1.100
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	31	186	25	280	44
Perusahaan Efek	72	1.534	128	12.335	364
Manajer Investasi	5	260	10	319	53
Kustodian	-	-	-	13	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	765	13.635	801	12.790	1.728

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	18.708	1.365.347	445.335	3.406.590	190.340
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	1	38	-	12	-
Pegadaian	13	129	11	110	8
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	6.335	736.313	45.744	202.074	19.831
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	6.372	97.961	6.977	110.454	8.064
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	2	127	9	11.935	14
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	1	1	-
PBJ	25	408	7	217	35
Pofesi	8	35	1	37	1
Total	641.893	9.096.160	1.016.599	10.524.990	745.022

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Tabel 5. Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada LTKM

Tindak Pidana Asal ^{*)}	2023	2024	2024					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	5	-	4	2	2	5
Di Bidang Kehutanan	87	98	2	2	4	20	8	4
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	-	1	2	1	-	7
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	48	28	39	38	49	46
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	187	184	321	196	197	167
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	93	71	71	52	61	54
Di Bidang Perbankan	4.952	4.855	785	411	314	255	306	291
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.972	493	457	554	430	525	657
Kepabeanan ^{**)}	146	66	9	3	6	11	13	8
Korupsi	6.795	7.561	599	584	652	593	739	683
Narkotika	3.560	3.727	235	421	442	259	293	376
Pemalsuan Uang	12	28	2	1	-	1	1	3
Penculikan	3	2	-	-	1	-	-	1
Pencurian	105	108	3	2	11	7	12	9
Penggelapan	42.363	6.180	222	399	547	170	305	1.089
Penipuan	24.222	29.260	3.008	2.230	2.418	1.854	2.142	2.267
Penyelundupan Migran	9	17	1	1	3	-	1	8
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	1	1	1	1	1	7
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	115	105	113	105	109	123
Perdagangan Orang	482	184	72	4	14	6	5	9
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	2	-	-	-	1	3
Perjudian	24.850	60.175	5.014	3.387	2.200	1.735	2.239	2.720
Prostitusi	36	102	2	10	5	3	3	3
Psikotropika	19	13	1	1	3	-	1	3
Terorisme	394	270	35	28	6	15	47	8
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	16.101	1.208	1.067	1.082	997	1.235	1.239
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	141.312	12.142	9.398	8.813	6.751	8.295	9.790

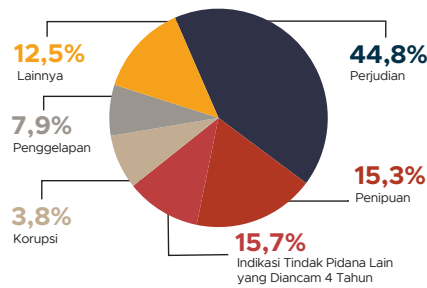
Catatan:

*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

**) Tindak Pidana ini pada implementasi GRIPS dicantumkan sebagai Penyelundupan Barang dan mulai pada implementasi GoAML akan didefinisikan kembali menjadi TP Cukai dan TP Kepabeanan.

Tindak Pidana Asal ^{a)}	2024						2025
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	4	1	1	6	2	7	5
Di Bidang Kehutanan	10	11	8	17	7	5	3
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	-	12	4	7	2	2	6
Di Bidang Lingkungan Hidup	29	56	92	40	65	28	41
Di Bidang Pasar Modal	237	200	370	275	259	225	272
Di Bidang Perasuransian	184	419	220	170	158	214	192
Di Bidang Perbankan	362	312	417	468	456	478	401
Di Bidang Perpajakan	515	542	457	464	357	521	458
Kepabeanaan ^{**)}	9	2	-	1	2	2	2
Korupsi	761	679	519	696	549	507	553
Narkotika	321	279	241	362	233	265	276
Pemalsuan Uang	1	1	4	3	-	11	55
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	3	7	24	13	3	14	11
Penggelapan	400	387	375	351	842	1.093	1.154
Penipuan	2.702	2.636	2.252	2.965	2.324	2.462	2.251
Penyelundupan Migran	-	1	2	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	4	2	-	1	2	-	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	135	141	78	112	101	104	103
Perdagangan Orang	10	15	10	28	6	5	5
Perdagangan Senjata Gelap	3	-	2	-	-	-	-
Perjudian	5.608	5.257	5.693	10.379	8.012	7.931	6.570
Prostitusi	1	9	9	34	16	7	6
Psikotropika	1	-	1	-	1	1	2
Terorisme	10	28	37	34	7	15	9
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	1.311	1.202	1.400	2.099	1.460	1.801	2.301
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.621	12.199	12.216	18.525	14.864	15.698	14.676

Grafik 5. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2025 (s.d Januari 2025)

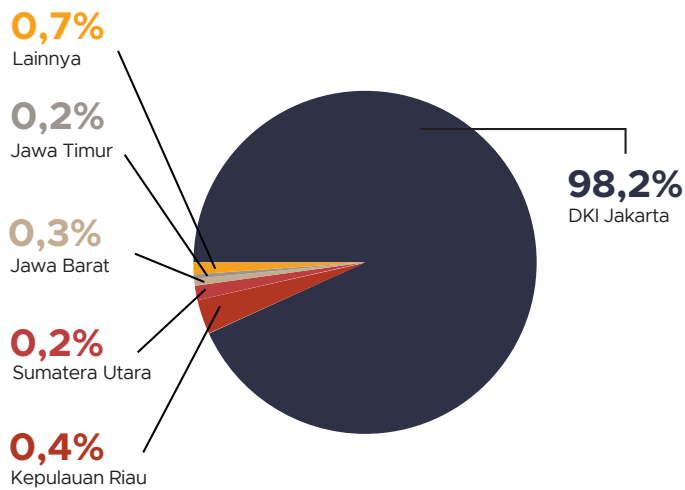


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2023	2024	2024					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	3	1	4	5	2	1
Sumatera Utara	216	742	25	41	21	58	46	40
Sumatera Barat	27	43	5	-	-	-	12	7
Sumatera Selatan	41	51	4	1	-	3	4	3
Bengkulu	8	10	-	1	-	-	-	-
Jambi	38	69	2	3	8	7	-	4
Riau	8	8	1	-	1	-	-	-
Kepulauan Riau	1.491	1.635	75	43	77	82	183	296
Lampung	298	212	12	26	51	17	13	8
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	513	36	52	56	23	23	19
DKI Jakarta	126.653	131.811	11.581	8.863	8.126	6.281	7.620	8.971
Jawa Barat	352	496	16	10	18	19	33	62
Jawa Tengah	384	79	15	9	10	1	2	3
Jawa Timur	262	248	13	29	10	4	2	19
DI Yogyakarta	46	33	2	4	5	1	2	-
Bali	122	128	16	10	8	6	9	4
Nusa Tenggara Barat	10	24	4	5	1	2	4	1
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	-	-	-	-	-
Maluku	3	3	-	-	3	-	-	-
Maluku Utara	2	7	-	-	3	1	1	-
Kalimantan Barat	53	90	3	10	7	1	2	5
Kalimantan Timur	14	17	-	-	1	-	-	1
Kalimantan Tengah	34	62	9	8	9	9	-	3
Kalimantan Selatan	65	52	-	2	7	-	2	15
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	-	-	2	-	-	1
Sulawesi Selatan	31	58	1	1	-	1	5	-
Sulawesi Tengah	9	2	-	1	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	2	-	-	6	-	1
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	-
Papua	50	84	-	4	5	-	8	3
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	136.546	11.825	9.124	8.433	6.527	7.973	9.467

Provinsi	2024						2025
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	2	4	-	-	1	2	-
Sumatera Utara	51	42	65	200	79	74	28
Sumatera Barat	3	-	7	1	5	3	3
Sumatera Selatan	4	5	7	10	6	4	9
Bengkulu	-	-	-	-	5	4	-
Jambi	8	6	13	6	4	8	5
Riau	1	-	1	1	-	3	-
Kepulauan Riau	211	128	173	152	106	109	58
Lampung	11	9	8	15	16	26	24
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	146	74	33	11	25	15	9
DKI Jakarta	11.416	11.418	11.263	17.402	13.970	14.900	14.006
Jawa Barat	62	35	43	118	35	45	49
Jawa Tengah	1	22	5	5	5	1	1
Jawa Timur	40	20	16	23	46	26	24
DI Yogyakarta	2	1	1	3	8	4	-
Bali	18	7	7	4	21	18	11
Nusa Tenggara Barat	2	2	1	-	1	1	3
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	2	-	6	-
Maluku	-	-	-	-	-	-	1
Maluku Utara	-	-	-	2	-	-	-
Kalimantan Barat	2	14	16	14	14	2	3
Kalimantan Timur	2	1	-	3	7	2	5
Kalimantan Tengah	2	6	9	5	1	1	4
Kalimantan Selatan	3	1	1	9	4	8	6
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	-	-	1	-	1	1
Sulawesi Selatan	6	7	7	11	6	13	6
Sulawesi Tengah	-	-	1	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	3	3	4	3	4	3	2
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	1	-	-	-	-
Papua	9	9	5	25	2	14	1
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	12.006	11.814	11.687	18.026	14.371	15.293	14.259

Grafik 6. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun 2025 (s.d Januari 2025)



PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai

Januari 2025

LTKT Bulan Ini



10,0%

Dibandingkan bulan
Desember 2024 (m-to-m)



- 3,5%

Dibandingkan bulan
Januari 2024 (c-to-c)

Laporan transaksi keuangan tunai merupakan laporan atas transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen uang kertas dan/atau uang logam dengan jumlah paling sedikit Rp500.000.000 atau dengan uang asing yang nilainya setara.

Jumlah Laporan Transaksi
Keuangan yang disampaikan
pihak pelapor ke PPATK

361.770

Jumlah Pelapor LTKT
Tahun 2025 s.d bulan
berjalan

389 Pihak Pelapor

286

Bank



Jumlah LTKT Kas Masuk

189.496

Jumlah LTKT Kas Keluar

172.274

103

Non Bank



Tabel 7. Jumlah Kumulatif LTKT dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Jan 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	335.944	3.398.298	370.973	3.648.756	359.071	286
Bank Umum	335.398	3.392.701	370.021	3.639.459	358.195	98
Bank Perkreditan Rakyat	546	5.597	952	9.297	876	188
Non Bank	2.818	30.460	3.913	41.606	2.699	103
Perusahaan Pembiayaan	8	61	8	82	8	4
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.623	24.403	2.777	29.179	1.733	81
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	53	519	54	612	50	4
Pegadaian	1.020	3.834	785	8.624	205	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	114	1.643	289	3.109	703	12
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 6

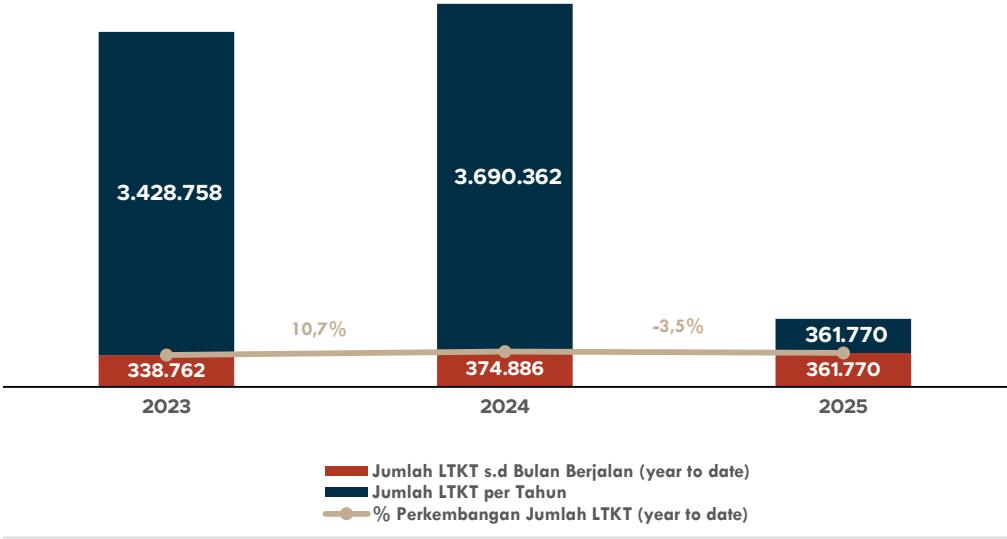
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Pasal 9 Huruf f

Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Jan 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	338.762	3.428.758	374.886	3.690.362	361.770	389

Grafik 7. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun Terakhir s.d Januari

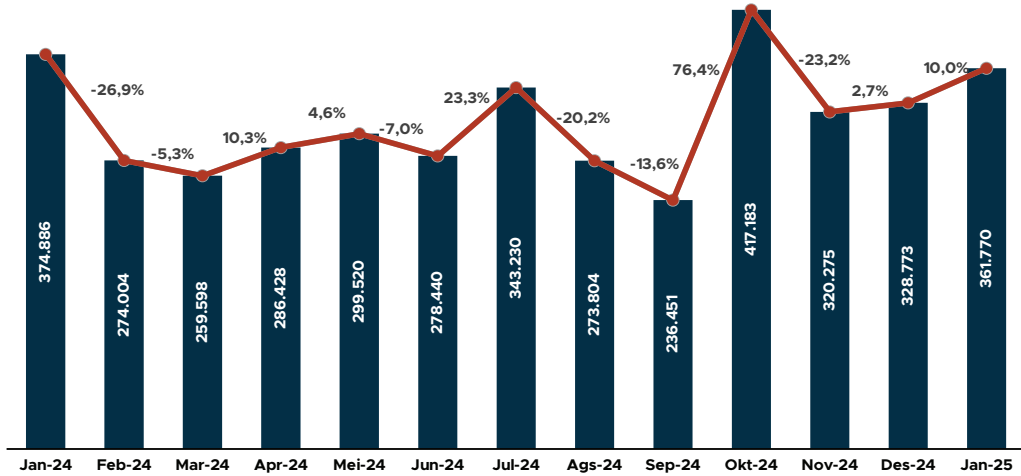


Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2024			
	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	370.973	271.057	256.795	282.422
Bank Umum	370.021	270.310	256.018	281.778
Bank Perkreditan Rakyat	952	747	777	644
Non Bank	3.913	2.947	2.803	4.006
Perusahaan Pembiayaan	8	6	2	5
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.777	2.165	2.268	2.421
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	54	33	49	45
Pegadaian	785	548	296	1.389
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	289	195	188	146
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	374.886	274.004	259.598	286.428

2024								2025
Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
295.993	275.557	339.477	270.435	234.071	409.868	316.855	325.253	359.071
295.257	274.966	338.615	269.622	233.531	408.887	316.157	324.297	358.195
736	591	862	813	540	981	698	956	876
3.527	2.883	3.753	3.369	2.380	5.085	3.420	3.520	2.699
13	11	8	6	3	8	6	6	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.562	1.985	2.825	2.446	1.556	3.503	2.446	2.225	1.733
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	53	44	44	38	89	51	65	50
734	633	673	531	563	1.099	717	656	205
-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	201	203	342	220	386	200	568	703
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
299.520	278.440	343.230	273.804	236.451	414.953	320.275	328.773	361.770

Grafik 8. Perkembangan Jumlah LTKT yang diterima oleh PPATK per Bulan



Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan Januari 2025

Kelompok Industri	Transaksi Keuangan Tunai			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi*) (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi*) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bank	187.773	319.409	171.298	293.662
Bank Umum	187.330	318.973	170.865	292.713
Bank Perkreditan Rakyat	443	436	433	949
Non Bank	1.723	5.632	976	4.296
Perusahaan Pembiayaan	8	6	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	827	4.458	906	4.226
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	27	20	23	14
Pegadaian	159	120	46	56
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	702	1.027	1	1
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	189.496	325.041	172.274	297.958

Catatan:
) Nominal transaksi dalam milyaran rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri^{*)}

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	3.836.008	37.316.659	3.924.667	43.277.188	4.356.462
Bank Umum	3.835.313	37.307.891	3.923.332	43.268.420	4.355.143
Bank Perkreditan Rakyat	695	8.768	1.335	8.768	1.319
Non Bank	4.094	58.211	5.939	58.211	4.260
Perusahaan Pembiayaan	8	65	13	65	8
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.800	47.166	4.694	47.166	3.137
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	55	532	55	532	56
Pegadaian	1.020	6.227	785	6.227	205
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	211	4.220	392	4.220	854
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	1	-	1	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Total	3.840.102	37.374.870	3.930.606	43.335.399	4.360.722

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Januari 2025

Penerimaan Laporan Pembawaan Uang Tunai pada Januari 2024:

2.677 Laporan

0%

Dibandingkan bulan Desember 2024 (m-to-m)

233,4%

Dibandingkan bulan Januari 2024 (y-to-y)

2.627

Laporan Pembawaan Uang Tunai

Lintas Batas Negara

39

Laporan **Pelanggaran** Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara

11

Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara **Mencurigakan**

Mayoritas dilaporkan oleh
KPU BC TIPE B BATAM

Mayoritas dilaporkan oleh
**KPU BC TIPE C
SOEKARNO-HATTA**

Tabel 11. Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Biasa Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.780	4.369	433	239	-	1	1.429	329	33	1.177	169	1.118	-	-	1.446
Soekarno Hatta	2.275	1.846	209	135	-	-	589	194	1	584	50	168	-	-	1.140
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	168	96	11	4	-	-	49	3	-	12	-	34	-	-	27
Entikong	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	31	-	1	-	-	2	-	-	-	-	56	-	-	13
Juanda	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Atambua	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Makassar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7.233	6.346	655	379	-	1	2.070	526	34	1.774	219	1.376	-	-	2.627



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal (34) ayat (1)

Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal (35) ayat (1)

Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Perka PPATK
No. 1 Tahun
2022

Pasal (2) ayat (1)

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia ke PPATK.

Pasal (2) ayat (2)

Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
b. Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau
c. Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan

Tabel 12. Jumlah Pelanggaran Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	10	4	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2
Soekarno Hatta	148	100	6	18	-	-	31	9	-	14	2	40	-	-	31
Tanjung Balai Karimun	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	57	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Entikong	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	10	25	-	-	-	-	1	-	-	-	-	48	-	-	4
Juanda	10	11	-	1	-	-	4	-	-	2	-	8	-	-	-
Atambua	15	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Sintete		22	-	-	-	-	21	1	-	-	-	-	-	-	1
Pekanbaru	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	259	166	7	20	-	-	61	10	-	19	2	96	-	-	39

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	109	2.106	104	-	-	-	2.001	-	-	1	-	-	-	-	-
Soekarno Hatta	477	174	37	11	-	-	75	11	-	30	2	16	-	-	1
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Entikong	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	594	2.282	141	11	-	-	2.077	12	-	31	2	16	-	-	1

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa Januari 2025

Jumlah LTPBJ
yang disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK

8.146

LTPBJ

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor
yang melaporkan LTPBJ
Tahun 2025 (s.d Januari 2025)

500

Pihak Pelapor

Pelaporan
bulan ini

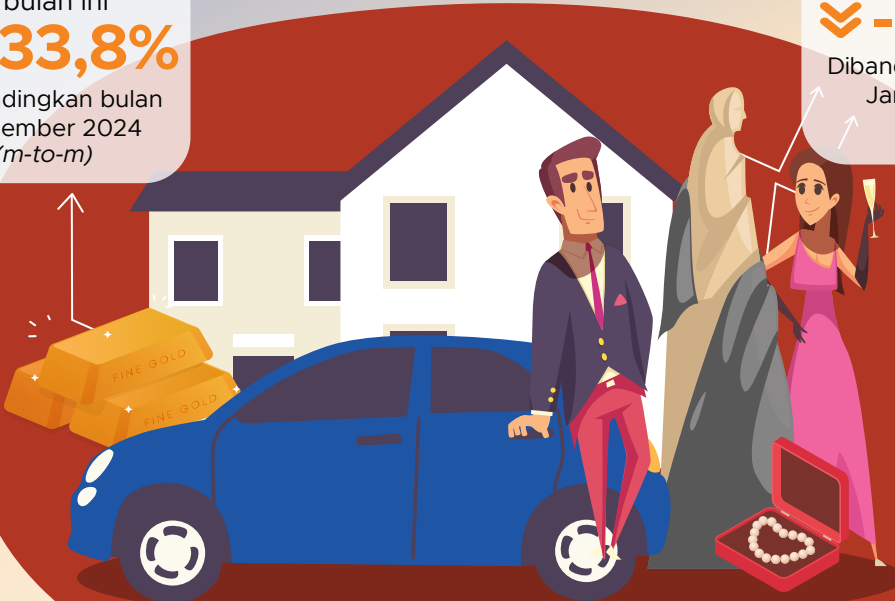
≈-33,8%

Dibandingkan bulan
Desember 2024
(m-to-m)

Pelaporan
bulan ini

≈-28,8%

Dibandingkan bulan
Januari 2023
(y-to-y)



Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK
sejak Mei 2012



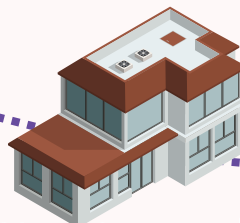
537

Laporan
Pedagang
Perhiasan/Logam
Mulia



4.947

Laporan
Pedagang Kendaraan
Bermotor



2.292

Laporan
Perusahaan
Properti



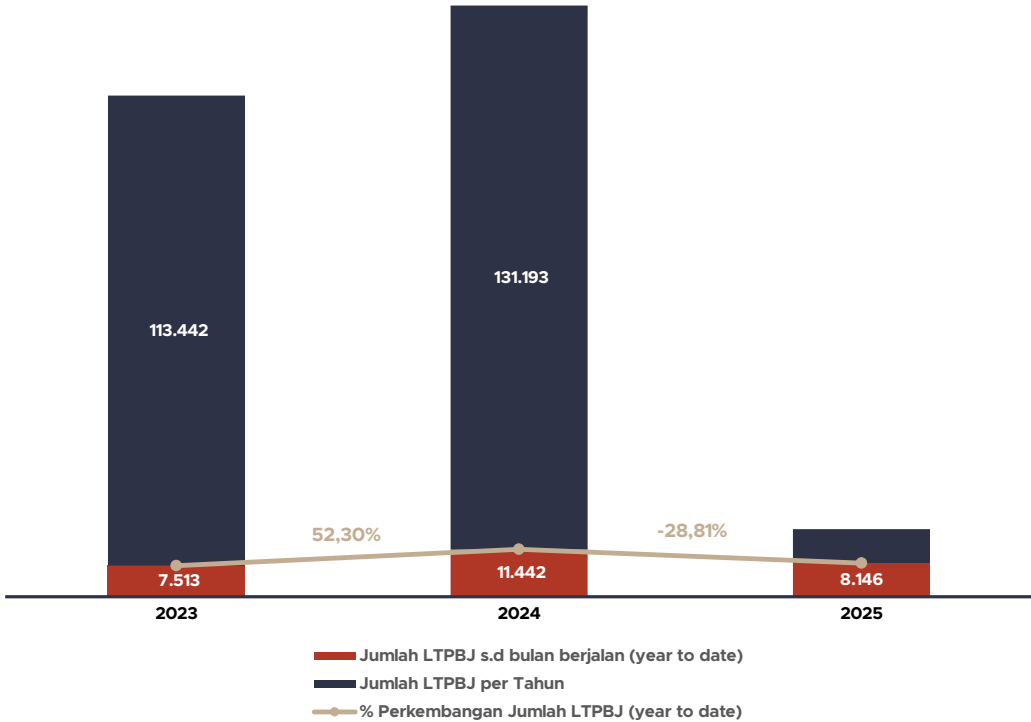
370

Laporan
Balai Lelang dan
KPKNL

Tabel 14. Jumlah Kumulatif LTPBJ dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2025 (s.d Jan 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	2.684	38.479	4.776	41.530	2.292	264
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.346	67.726	5.971	78.720	4.947	188
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	308	3.710	410	6.747	537	7
Balai Lelang dan KPKNL	175	3.527	285	4.196	370	41
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	7.513	113.442	11.442	131.193	8.146	500

Grafik 9. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ dalam 2 Tahun Terakhir s.d Januari 2025



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal (1) Ayat 5

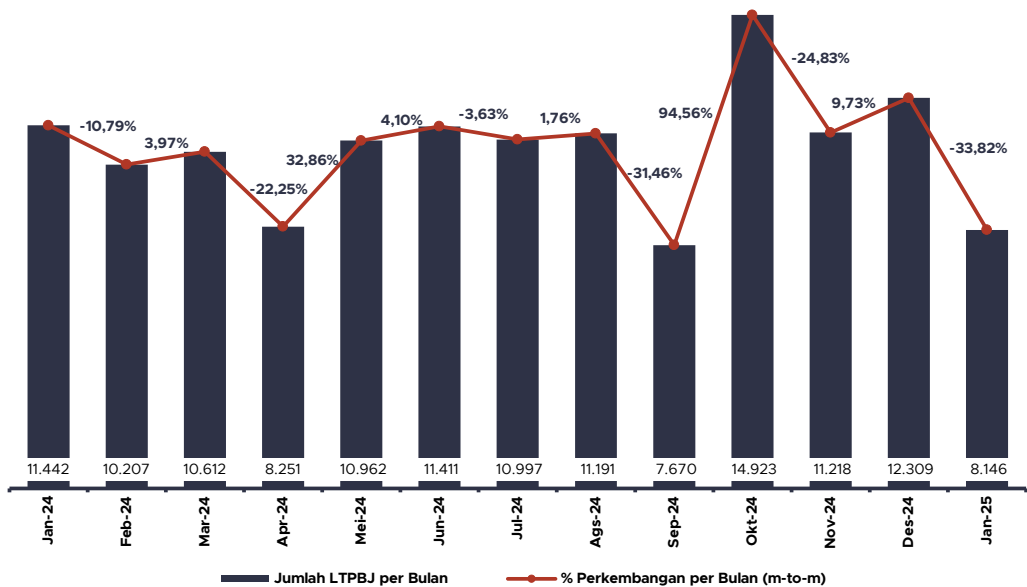
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Tabel 15. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

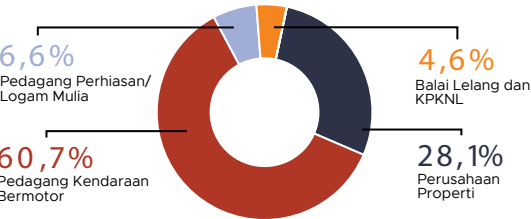
Kelompok Industri	2024					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti	4.776	3.658	3.202	2.532	3.705	3.932
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.971	5.996	6.813	5.141	6.493	6.795
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	410	369	309	340	452	375
Balai Lelang dan KPKNL	285	184	288	238	312	309
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-
Total	11.442	10.207	10.612	8.251	10.962	11.411

Kelompok Industri	2024						2025
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti	3.356	2.976	2.210	4.695	3.213	3.275	2.292
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.649	7.049	4.741	8.613	6.508	7.951	4.947
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	569	719	454	980	1.134	636	537
Balai Lelang dan KPKNL	423	447	265	635	363	447	370
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.997	11.191	7.670	14.923	11.218	12.309	8.146

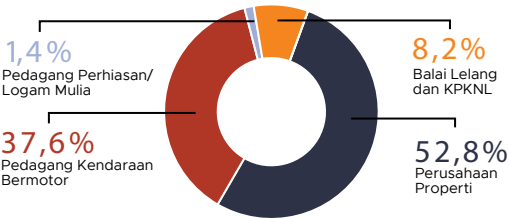
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



Grafik 11. Distribusi Jumlah Penerimaan LTPBJ Tahun 2025 (s.d Jan 2025)



Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak Pelapor yang Menyampaikan LTPBJ Tahun 2025 (s.d Jan 2025)



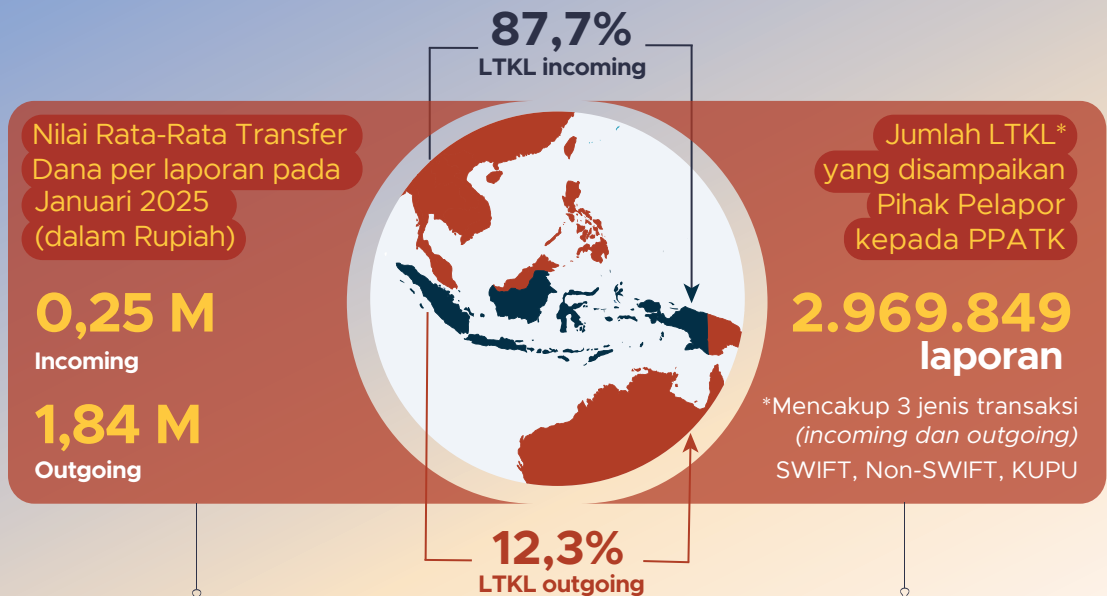
Tabel 16. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2023		2024		2025
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti	2.826	42.821	4.929	44.284	2.346
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.565	79.135	6.659	92.002	5.790
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	1.567	28.313	2.692	38.746	1.833
Balai Lelang dan KPKNL	180	3.768	434	5.359	552
Pedagang Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-
Total	9.138	154.037	14.714	180.391	10.521

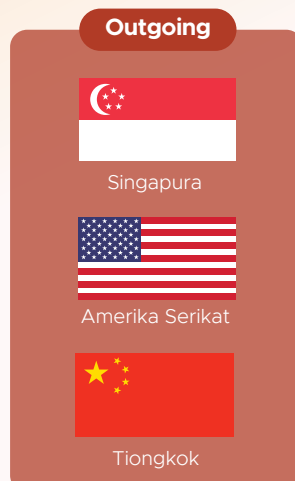
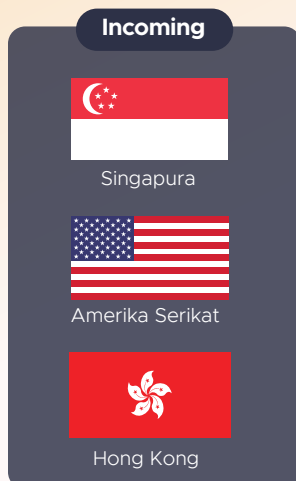
LTKL

Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri

Januari 2025



Tiga besar negara tujuan dan asal transfer dana terbesar berdasarkan nominal transaksi



**Pelaporan dimulai sejak Januari 2014
Dilaporkan oleh:**

- Penyedia Jasa Keuangan (PJK): Bank,
- Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet dan,
- Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU).

Tabel 17. Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan/ ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan

Jenis Transaksi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.503	2.244	2.362	2.297	2.181	2.010	2.261	2.146	1.732	2.908	2.358	2.692	2.604
SWIFT	6.112	10.774	431	357	370	427	398	359	425	391	254	505	357	388	368
NON-SWIFT	20.830	43.839	2.069	1.885	1.990	1.869	1.781	1.649	1.834	1.753	1.477	2.399	1.999	2.302	2.234
KUPU	20	43	2	2	2	2	2	1	2	2	2	4	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	353	284	302	282	329	293	362	363	246	478	327	369	366
SWIFT	3.355	6.994	330	263	280	260	305	271	332	333	222	424	292	328	323
NON-SWIFT	150	467	21	19	19	20	20	20	28	28	22	49	33	37	40
KUPU	19	50	2	2	3	2	3	3	2	2	2	5	3	3	2
Total	30.485	62.167	2.856	2.528	2.664	2.580	2.509	2.303	2.623	2.509	1.978	3.387	2.685	3.061	2.970

Tabel 18. Jumlah Kumulatif LTKL dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri

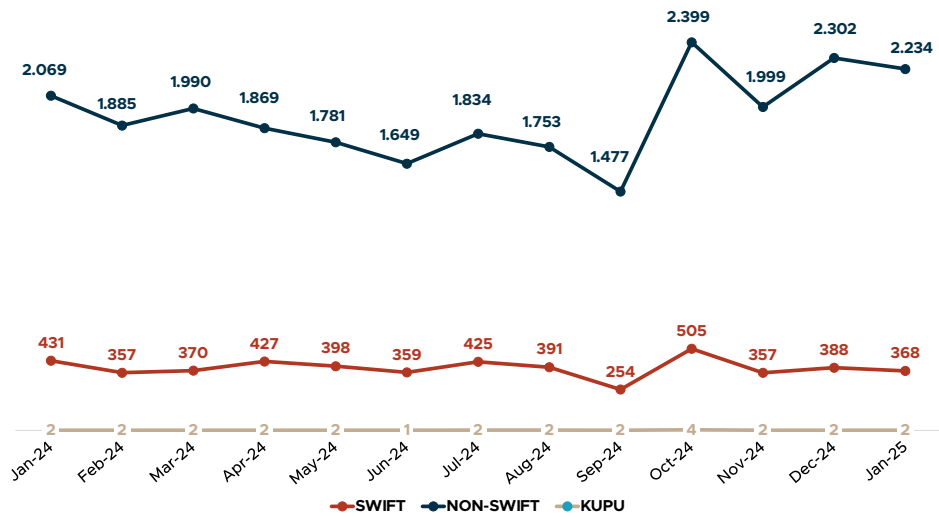
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2025 (s.d. Jan 2025)
	2023		2024		2025	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.333.281	30.447.078	2.851.827	31.626.312	2.966.013	71
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	4	88	15	30	0	73
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	2.815	38.124	3.709	55.122	3.836	0
Total	2.336.100	30.485.290	2.855.551	31.681.464	2.969.849	144



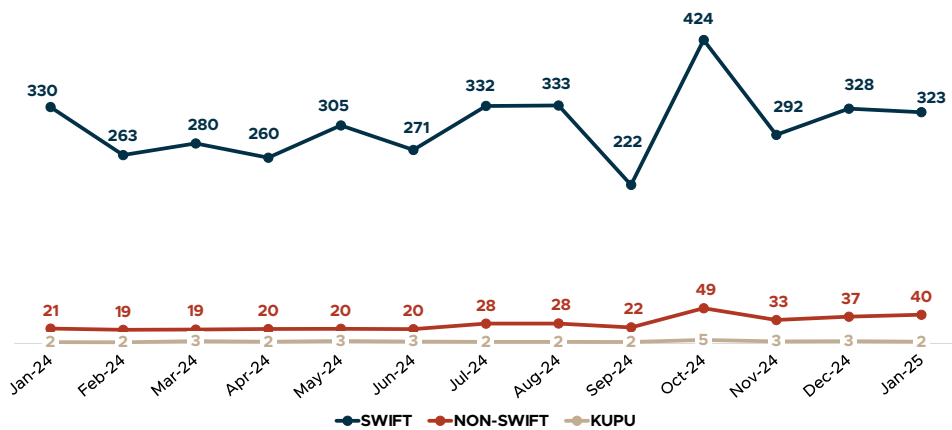
Pasal 1 Ayat (4)

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri

Grafik 13. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana dari Luar Negeri (*Incoming*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Januari 2024 s.d. Januari 2025 (dalam Ribuan)



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Januari 2024 s.d. Januari 2025 (dalam Ribuan)



Tabel 19. Jumlah Nominal Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Triliun Rupiah), per Bulan

Jenis Transaksi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	677	482	567	555	599	631	688	596	400	808	588	688	660
SWIFT	11.102	6.746	642	444	528	516	558	593	638	553	372	744	527	632	610
NON-SWIFT	369	398	28	31	32	27	30	27	39	33	21	50	35	45	40
KUPU	80	134	8	7	8	11	11	10	11	10	7	14	26	11	11
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	652	485	556	479	629	567	710	620	403	825	562	642	673
SWIFT	7.849	6.772	629	460	533	457	597	545	674	584	382	779	526	606	636
NON-SWIFT	261	267	18	21	19	15	19	17	27	26	16	36	28	26	31
KUPU	45	90	5	4	4	6	13	6	9	11	6	10	8	10	6
Total	19.706	14.407	1.329	966	1.123	1.033	1.228	1.198	1.398	1.216	803	1.633	1.150	1.331	1.333

Tabel 20. Jumlah Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan

Jenis Transaksi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	3.959	3.567	3.757	4.199	4.018	3.643	4.111	3.788	2.785	5.001	3.982	4.494	4.445
SWIFT	6.250	4.784	442	371	381	438	408	370	437	403	259	516	364	396	382
NON-SWIFT	20.830	23.019	2.069	1.885	1.991	1.870	1.783	1.650	1.835	1.754	1.477	2.400	2.000	2.303	2.235
KUPU	14.531	19.503	1.448	1.311	1.386	1.891	1.827	1.624	1.839	1.631	1.050	2.084	1.618	1.795	1.827
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	553	456	450	433	489	444	530	547	346	723	466	571	550
SWIFT	3.422	3.703	337	269	285	265	311	276	339	339	224	430	296	333	338
NON-SWIFT	150	317	21	19	19	20	20	20	28	28	22	49	33	37	40
KUPU	1.621	1.988	195	168	145	148	158	148	163	180	100	244	137	201	172
Total	46.805	53.313	4.512	4.023	4.207	4.632	4.508	4.087	4.640	4.335	3.132	5.724	4.448	5.065	4.995

Tabel 21. Daftar 20 Negara Asal
Transfer Dana (*Incoming*)
berdasarkan Jumlah LTKL
Terbanyak, Januari 2025

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	589.539
Taiwan	395.305
Singapura	329.716
Amerika Serikat	276.595
Jepang	215.144
Korea Selatan	139.083
Australia	136.735
Hong Kong	72.652
Arab Saudi	71.748
Uni Emirat Arab	62.063
Inggris	48.321
Belanda	38.517
Jerman	33.360
Irlandia	22.087
Polandia	18.557
Brunei Darussalam	17.755
Prancis	12.026
Qatar	11.340
Tiongkok	8.910
Kanada	8.603
Lainnya	97.017
Total	2.605.073

Catatan:
96% dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Januari 2025 berasal dari 20 negara di atas.

Tabel 22. Daftar 20 Negara Tujuan
Transfer Dana (*Outgoing*)
berdasarkan Jumlah LTKL
Terbanyak, Januari 2025

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	121.489
Singapura	45.568
Amerika Serikat	35.185
Hong Kong	28.291
Australia	17.203
Malaysia	15.930
Inggris	14.145
Jepang	10.725
Korea Selatan	10.103
Thailand	9.923
India	8.934
Taiwan	6.583
Jerman	6.239
Prancis	4.460
Belanda	4.335
Vietnam	3.347
Kanada	3.279
Italia	2.877
Uni Emirat Arab	2.493
Filipina	1.998
Lainnya	12.646
Total	365.753

Catatan:
97% dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Januari 2025 ditujukan ke 20 negara di atas.

**Tabel 23. Daftar 20 Negara Asal
Transfer Dana (Incoming)
berdasarkan Jumlah
Nominal Transaksi Terbesar,
Januari 2025**

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	239.479
Amerika Serikat	150.539
Hong Kong	88.488
Tiongkok	59.571
Jepang	40.717
Inggris	34.004
Malaysia	30.365
Taiwan	26.420
Korea Selatan	24.855
Thailand	24.080
Uni Emirat Arab	21.794
Australia	17.157
Belanda	15.877
Jerman	15.727
Filipina	14.016
India	13.909
Swiss	12.883
Prancis	12.792
Turki	12.284
Kanada	11.695

**Tabel 24. Daftar 20 Negara Tujuan
Transfer Dana (Outgoing)
berdasarkan Jumlah
Nominal Transaksi Terbesar,
Januari 2025**

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	219.687
Amerika Serikat	140.659
Tiongkok	113.086
Hong Kong	70.388
Inggris	38.231
Jepang	29.570
Korea Selatan	22.436
Malaysia	20.859
Taiwan	18.120
Thailand	17.665
Australia	11.642
Jerman	11.246
India	10.604
Uni Emirat Arab	9.762
Vietnam	9.492
Swiss	9.358
Belanda	9.144
Prancis	7.692
Italia	5.866
Kanada	5.772



LPT

Laporan Penundaan Transaksi
Januari 2025



Penerimaan Laporan
Penundaan Transaksi
pada Januari 2025

917 Laporan

Penerimaan LPT bulan ini:

≈ **-1,1%**

Dibandingkan bulan
Desember 2024 (m-to-m)

≈ **1289,4%**

Dibandingkan bulan Januari
2024 (y-to-y)

Penundaan Transaksi

72,2%

Laporan memenuhi aspek formil namun aspek materil belum terpenuhi

86,4%

Jenis transaksi yang ditunda merupakan transaksi lainnya

95,6%

Penundaan transaksi dilakukan oleh Bank Swasta

96,9%

Sebagian besar nominal transaksi yang ditunda dibawah Rp100 juta

88,4%

Domisili PJK penunda transaksi mayoritas terjadi di DKI Jakarta

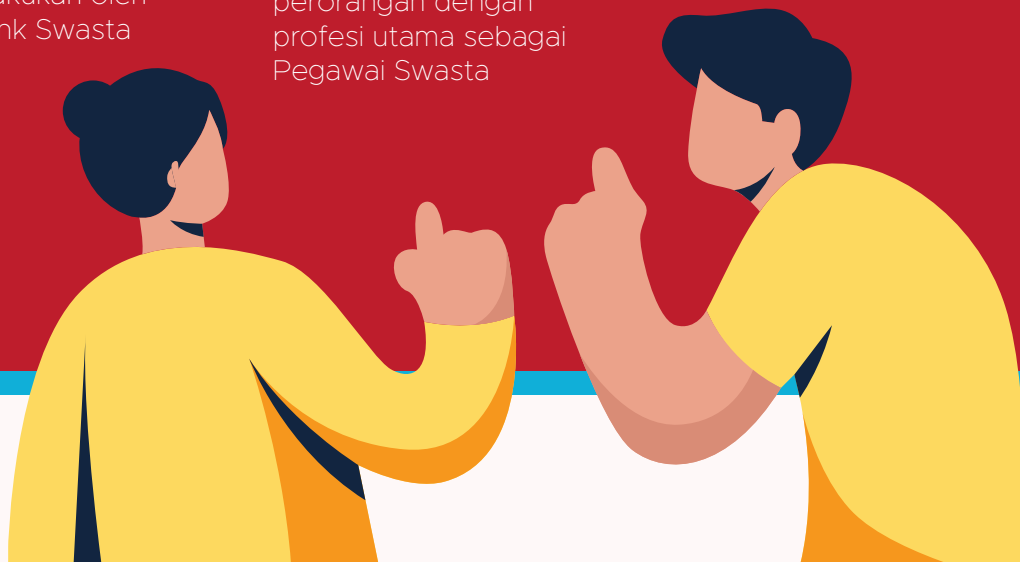
36,8%

99,6% terlapor adalah perorangan dengan profesi utama sebagai Pegawai Swasta

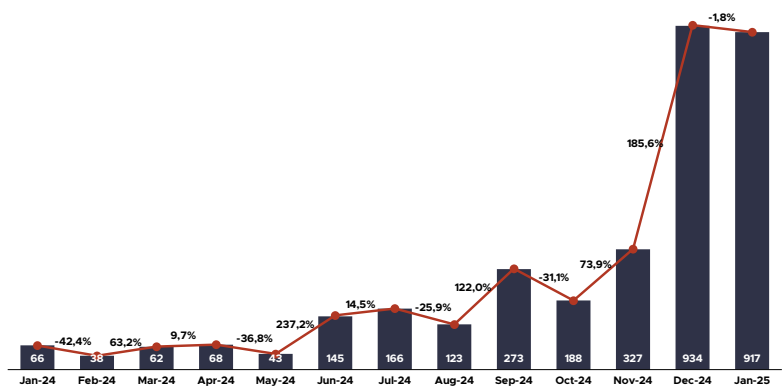
17,8%

Sebanyak 53,1% transaksi yang ditunda dan teridentifikasi alasan penundaannya. Adapun alasan penundaan transaksi terbanyak yaitu:

1. Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.
2. Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana



Grafik 15. Jumlah LPT yang diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir



Tabel 25. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	679	2.402	65	36	55	67	41	142	164	122	271	184	324	931	912
Bank Umum	679	2.402	65	36	55	67	41	142	164	122	271	184	324	931	912
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	99	214	10	-	9	4	9	10	31	46	8	12	12	63	35
Bank Pembangunan Daerah	10	20	9	1	1	-	1	1	-	1	1	5	-	-	5
Bank Swasta	570	2.168	46	35	45	63	31	131	133	75	262	167	312	868	872
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non Bank	26	31	1	2	7	1	2	3	2	1	2	4	3	3	-
Total	705	2.433	66	38	62	68	43	145	166	123	273	188	328	934	917



1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Tabel 26.Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	53	116	7	3	7	2	3	12	21	2	6	9	13	31	25
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	612	1853	57	35	52	63	36	101	125	120	249	134	287	594	662
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	6	17	-	-	-	-	-	2	2	-	-	5	2	6	3
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	34	447	2	0	3	3	4	30	18	1	18	40	25	303	227
Total	705	2.433	66	38	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917

Tabel 27.Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda

Kategori Nominal Transaksi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dibawah 100 juta	441	2300	59	35	55	66	40	131	143	121	267	174	312	897	889
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	42	110	5	1	5	2	3	12	19	2	4	11	12	34	21
Diatas Rp1 Milyar	17	23	2	2	2	-	-	2	4	-	2	3	3	3	7
Tidak Terisi	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	705	2.433	66	38	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917

Tabel 28.Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda

Jenis Transaksi			2023					2024							
	2023	2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Electronic Banking*)	200	451	35	20	23	13	9	8	16	13	64	64	49	137	122
Tarik/Setor Tunai	6	8	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
Polis Asuransi	9	17	-	1	2	1	1	1	2	1	2	4	1	1	3
Remittance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lainnya	320	1.957	26	16	37	54	33	136	148	109	205	120	277	796	792
Tidak Terisi	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	705	2.433	66	38	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917

Catatan:
*) Electronic Banking meliputi Transfer Bank, Autodebet, ATM, E-Banking/Mobile Banking, dan sebagainya

Tabel 29. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	686	2.400	65	38	62	67	42	145	162	123	268	187	315	926	913
Pegawai Swasta	149	737	15	6	20	15	10	37	25	23	124	43	69	350	337
Pengusaha/ Wiraswasta	113	470	14	9	17	7	13	26	35	19	59	33	57	181	144
Pedagang	-	60	1	1	-	-	-	-	2	2	3	6	11	34	45
PNS termasuk pensiunan	12	23	-	1	-	1	-	-	-	-	12	-	4	5	4
Ibu Rumah Tangga	60	92	1	1	2	2	1	1	2	3	5	30	10	34	29
Professional dan Konsultan	7	16	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	14	9
PEPs	2	7	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Buruh	9	12	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	11
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelajar/Mahasiswa	53	86	7	1	1	5	1	4	3	3	5	14	14	28	39
Pengajar/Dosen	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Lain-Lain	238	857	21	14	21	34	14	75	93	66	57	58	146	258	288
Belum/Tidak Bekerja	2	4	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
Pegawai BUMN	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4
Pegawai Bank	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Petani dan Nelayan	23	26	2	4	-	1	2	1	2	4	1	1	2	6	3
Korporasi	19	33	1	-	-	1	1	-	4	-	5	1	12	8	4
Total	705	2.433	66	38	62	68	43	145	166	123	273	188	327	934	917

Tabel 30. Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

Alasan Penundaan Transaksi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pertimbangan (1) dan (2)	22	190	1		7	2	2	5	4	7	11	7	39	105	163
Pertimbangan (1) dan (3)	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
Pertimbangan (2) dan (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertimbangan (1) saja	254	789	17	17	13	24	8	86	81	33	46	85	85	294	155
Pertimbangan (2) saja	119	183	16	16	8	28	6	7	7	4	5	5	24	57	6
Pertimbangan (3) saja	1	251	-	-	-	-	3	-	34	-	154	19	4	37	74
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	197	354	18	1	32	9	21	9	32	56	20	20	27	109	69
Total	593	1.787	52	34	60	63	40	107	158	100	236	136	179	622	487

Catatan:

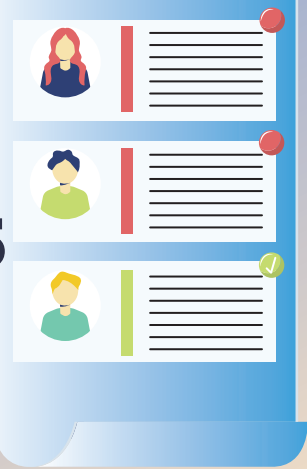
- Pertimbangan 1: Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Pertimbangan 2: Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- Pertimbangan 3: Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu
- Jumlah berdasarkan rekap berita acara yang alasan penundaannya teridentifikasi dengan jelas sesuai peraturan terkait penundaan



HA

Hasil Analisis

Januari 2025



Jumlah Hasil Analisis
yang dihasilkan PPATK
pada Januari 2025

79 Hasil Analisis

≈ **-11,2%**
dibandingkan
bulan Desember
2024 (m-to-m)

≈ **64,6%**
dibandingkan
bulan Januari
2024 (y-to-y)

Kategori Terlapor
pada **HA Proaktif**:

70%

Korporasi



Mayoritas Locus
pada **HA Proaktif**:

27%

DKI Jakarta



Persentase Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK
pada Januari 2025 berdasarkan jenis HA



HA Proaktif
29,1%

HA Reaktif
70,9%

Mayoritas Tindak Pidana Asal
pada Hasil Analisis

27,8%
TP Korupsi



19,0%
TP Perpajakan



13,9%
TP Penipuan



10,1%
TP Narkotika



10,1%
TP Penggelapan



19,1%
TP Lainnya



Tabel 31. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Hasil Analisis	289	347	20	28	18	19	23	38	31	40	39	27	30	34	23
INQUIRY															
Hasil Analisis	521	457	28	34	28	32	19	30	41	62	42	40	46	55	56
Total HA	810	804	48	62	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79

Catatan:

- Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada *Stakeholders*

Tabel 32. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	372	412	24	28	23	25	24	42	35	54	39	32	39	47	39
Kejaksaan	99	106	8	7	8	9	6	8	9	20	9	10	10	2	9
KPK	102	91	5	7	3	4	4	6	6	10	16	12	8	10	10
Ditjen Pajak	137	139	3	12	9	12	5	11	11	12	16	8	14	26	15
Ditjen Bea dan Cukai	26	8	2	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	1
Badan Narkotika Nasional (BNN)	37	22	4	6	1	1	1	-	5	2	-	1	1	-	-
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	37	26	2	2	2	-	2	-	4	2	1	4	4	3	5
Total	810	804	48	62	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	79



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (2) ayat (2)

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

Pasal (44) ayat (1) huruf e dan l

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
- meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

Tabel 33. Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme

Hasil Analisis	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	29	10	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	5	2
Inquiry	28	15	3	4	-	-	-	1	1	5	1	-	-	-	1
Total	57	25	3	5	-	1	-	1	2	6	2	-	-	5	3

Tabel 34. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	830	5.762	125	72	33	44	56	3.742	956	196	186	105	169	78	21
Korporasi	225	210	6	12	12	7	14	5	58	20	26	26	10	14	50
Total	1.055	5.972	131	84	45	51	70	3.747	1.014	216	212	131	179	92	71

Catatan:
Pihak Terlapor dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga jumlah pada kategori terlapor akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

Tabel 35.Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	7	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Di Bidang Kehutanan	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	11	21	1	3	1	-	1	-	2	1	4	4	2	2	2
Di Bidang Pasar Modal	4	9	1	1	1	-	1	-	3	1	-	1	-	-	1
Di Bidang Perasuransian	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	6	14	-	1	1	2	-	-	-	5	-	1	4	-	2
Di Bidang Perpajakan	133	140	3	12	9	12	5	11	11	12	15	8	14	28	15
Kepabeanaan	16	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korupsi	245	239	15	23	14	15	10	29	20	31	26	22	20	14	22
Narkotika	110	119	9	9	9	13	8	11	13	9	7	11	12	8	8
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	29	18	2	-	-	-	3	-	3	2	2	2	2	2	8
Penipuan	97	101	6	5	6	7	11	7	9	8	11	11	9	11	11
Penyelundupan Migran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	14	7	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-
Perdagangan Orang	13	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	2	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Perjudian	15	58	2	1	-	-	-	7	4	14	7	3	6	14	5
Prostitusi	2	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	57	25	3	5	-	1	-	1	2	6	2	-	-	5	3
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	8	18	-	1	-	-	1	1	-	9	4	-	1	1	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	25	14	1	1	2	-	-	-	3	1	3	-	2	1	-
Aset Tracing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	810	804	48	62	46	51	42	68	72	102	81	67	76	89	89

Tabel 36.Jumlah HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

Wilayah	2023	2024	2024												2025	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aceh	2	6	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
Sumatera Utara	6	21	2	4	-	1	2	-	-	3	5	2	1	1	1	
Sumatera Barat	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
Sumatera Selatan	3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Jambi	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Riau	4	18	1	1	1	1	-	1	1	2	4	1	4	1	-	
Kepulauan Riau	14	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Lampung	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
Kep Bangka Belitung	7	8	-	1	-	2	-	4	-	-	-	1	-	-	1	
Banten	17	10	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	5	
DKI Jakarta	92	145	8	8	4	6	7	17	12	20	18	20	11	14	8	
Jawa Barat	35	37	3	3	2	2	1	3	2	3	5	3	5	5	5	
Jawa Tengah	14	13	1	-	1	2	-	-	-	4	2	-	2	1	2	
Jawa Timur	29	48	2	3	3	-	1	6	4	11	6	1	7	4	-	
DI Yogyakarta	-	7	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	-	-	
Bali	6	7	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	
Nusa Tenggara Barat	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
Nusa Tenggara Timur	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
Maluku	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Maluku Utara	2	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
Kalimantan Barat	16	18	-	-	2	4	4	4	1	-	2	-	1	-	1	
Kalimantan Timur	13	14	1	3	-	-	2	1	1	1	1	2	2	-	-	
Kalimantan Tengah	2	6	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	
Kalimantan Selatan	6	12	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	4	4	-	
Kalimantan Utara	1	6	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Utara	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Sulawesi Selatan	9	12	2	2	1	1	-	2	-	1	1	-	-	2	1	
Sulawesi Tengah	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Tenggara	11	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorontalo	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
Papua Barat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Papua Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-Lain	18	7	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	1	-	1	
Total	329	425	24	31	18	24	26	40	34	51	51	38	44	44	30	

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



HP

Hasil Pemeriksaan

Januari 2025

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, PPA TK menyampaikan Hasil Pemeriksaan kepada Instansi Penegak Hukum.

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik

2

HP

Jumlah Rekening yang diperiksa

815

Rekening

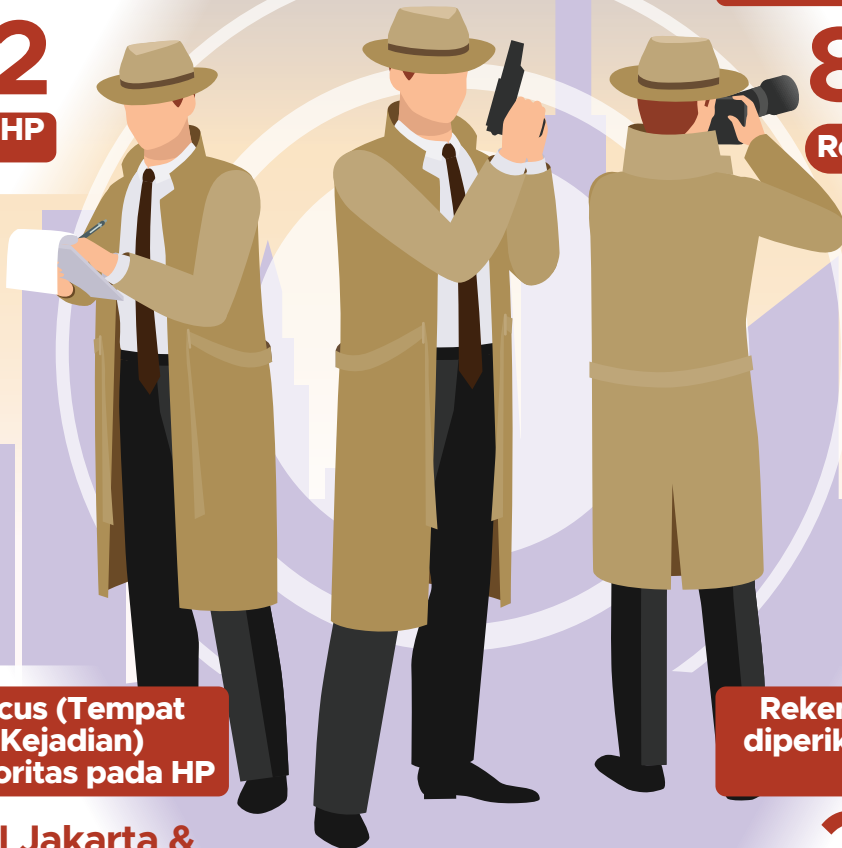
Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP

DKI Jakarta & Sumatera Utara

Rekening yang diperiksa berasal dari

25

Penyedia Jasa Keuangan



Tabel 37. Jumlah HP yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan

Penyidik	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	5	8	-	-	1	2	-	-	1	2	1	-	1	-	1
Kejaksaan	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
KPK	9	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
BNN	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJP	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
DJBC	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPNS	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Total	24	19	-	-	2	2	-	-	1	2	1	-	3	8	2

Tabel 38. Jumlah PJK dan Rekening/CIF terkait Hasil Pemeriksaan per Bulan

Pemeriksaan	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK	233	317	-	-	5	9	-	-	4	13	4	-	16	266	25
Rekening/ CIF	1.816	893	-	-	38	110	-	-	26	168	12	-	122	417	815



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 1 ayat (7)

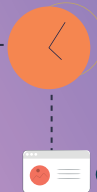
Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.



INFORMASI

Analisis Transaksi Keuangan

Januari 2025



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, **PPATK menyampaikan Informasi kepada penyidik lainnya Non APH misalnya PPNS. Informasi yang disampaikan juga termasuk dengan informasi seleksi jabatan strategis.**



Jumlah Informasi yang disampaikan ke Stakeholder

41

Informasi



Mayoritas Klasifikasi Informasi

56,1%

Fit & Proper



Mayoritas Tujuan Penyampaian Informasi

26,8%

kepada OJK

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini



-8,9%

Dibandingkan bulan Desember 2024 (m-to-m)



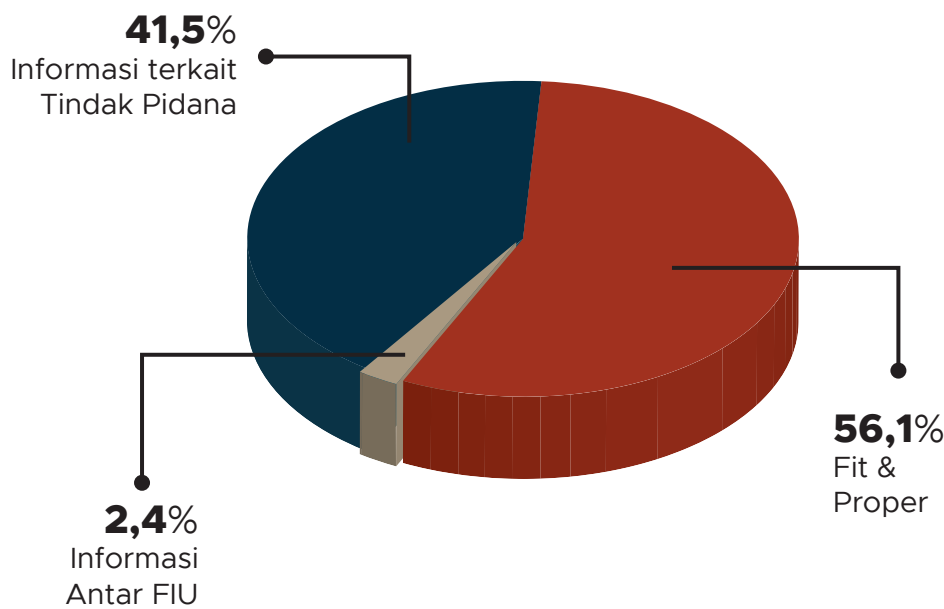
- 18,0%

Dibandingkan bulan Januari 2024 (c-to-c)

Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

Informasi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	240	263	14	8	15	18	36	14	39	21	24	31	22	21	23
Initial Public Offering	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informasi antar FIU	33	32	1	7	3	4	-	7	2	2	1	1	2	2	1
Informasi terkait Tindak Pidana	168	230	35	20	18	26	16	18	12	20	15	16	12	22	17
Total	461	525	50	35	36	48	52	39	53	43	40	48	36	45	41

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Januari 2025



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 1
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:
e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri”

Tabel 40. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan berdasarkan tujuan Kementerian/Lembaga per Bulan

Informasi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKP	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
KPK	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Sekretariat Kabinet	18	19	-	4	-	-	1	-	-	1	1	1	7	4	-
Bawaslu	2	39	27	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Bank Indonesia	8	14	1	2	-	3	-	4	-	-	-	2	1	1	8
Badan Intelijen Negara	63	31	1	3	3	6	7	1	1	1	2	3	2	1	3
BNPT	21	63	1	2	4	13	4	3	6	9	5	7	2	7	4
Mahkamah Agung	13	10	1	-	4	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-
Komisi Yudisial	5	12	1	-	-	-	6	3	-	1	1	-	-	-	-
Otoritas Jasa Keuangan	181	170	11	2	10	10	21	10	30	15	12	25	12	12	11
Kementerian Keuangan	6	11	-	2	2	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1
Kementerian Dalam Negeri	14	21	2	-	3	4	1	3	1	3	1	1	1	1	2
Kemenkumham	5	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	1	10	1	1	1	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-
Lainnya	75	83	2	2	5	8	9	6	8	6	10	5	8	14	11
FIU Negara Lain	33	33	1	7	3	4	1	7	2	2	1	1	2	2	1
Total	461	525	50	35	36	48	52	39	53	43	40	48	36	45	41

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

PERMINTAAN INFORMASI

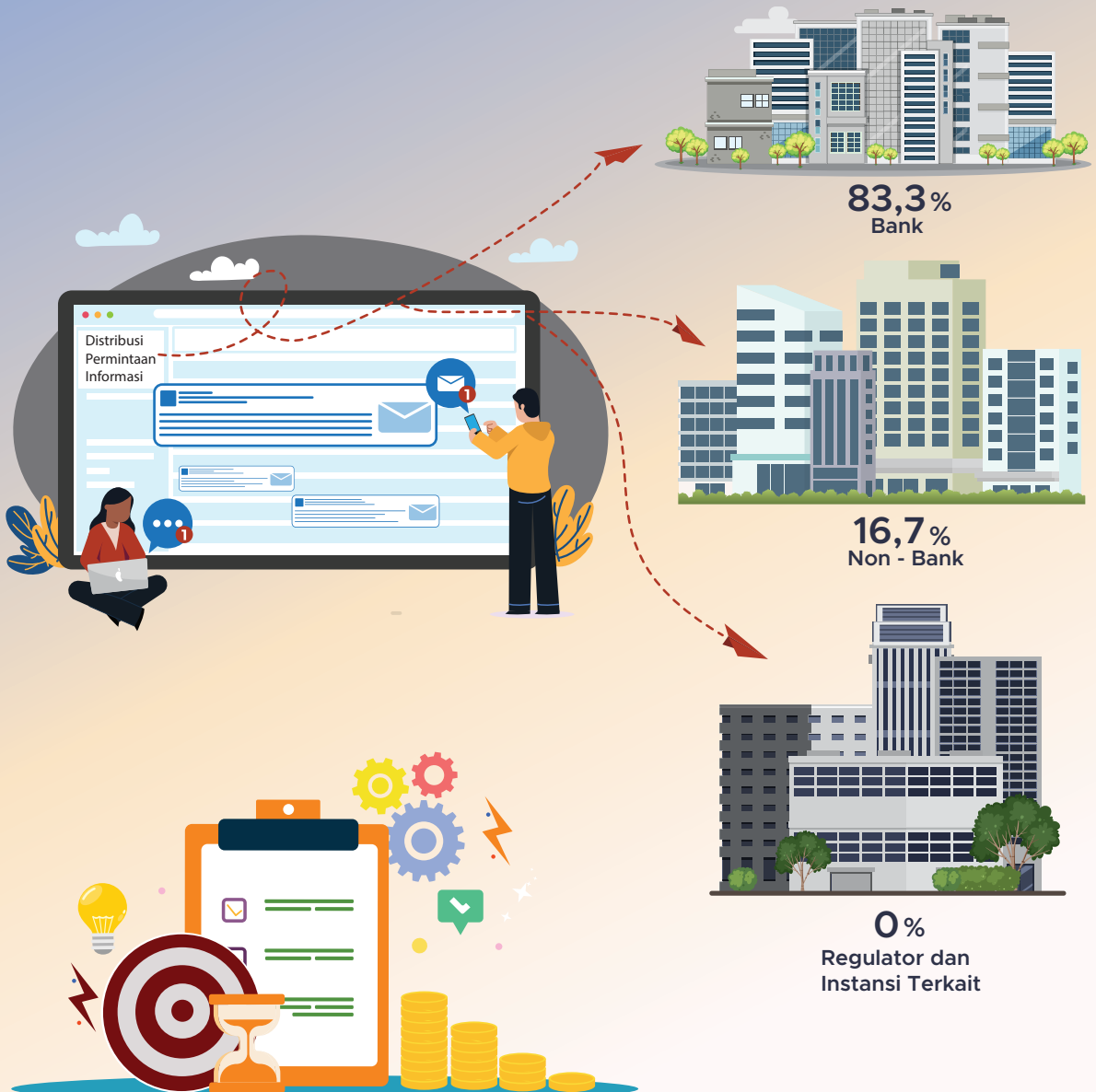
Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait

Januari 2025

PPATK meminta informasi kepada pihak pelapor/Instansi terkait dalam rangka melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan

Jumlah Permintaan Informasi yang dikirimkan PPATK pada Tahun 2025 (s.d Januari 2025)

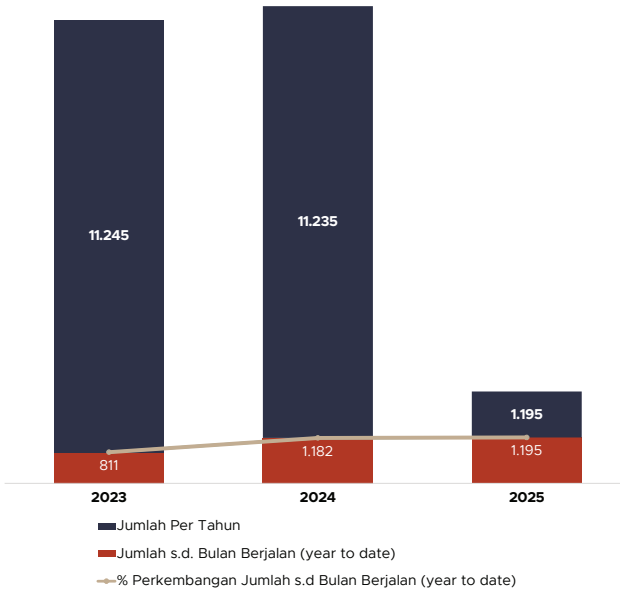
1.195 **Permintaan**



Tabel 41. Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait per Bulan

Tujuan Permintaan Informasi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Bank	7.990	8.361	930	665	837	478	409	527	973	867	653	517	677	818	996
Non Bank	3.218	2.861	248	172	297	173	196	67	274	323	290	184	207	430	199
Regulator/ Instansi Terkait	37	13	4	-	-	-	1	1	4	2	-	-	1	-	-
Total	11.245	11.234	1.182	837	1.134	651	606	595	1.251	1.192	943	711	885	1.248	1.195

Grafik 17. Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait Hingga Bulan Berjalan dan Akhir Tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir



Pasal 44 ayat (1)

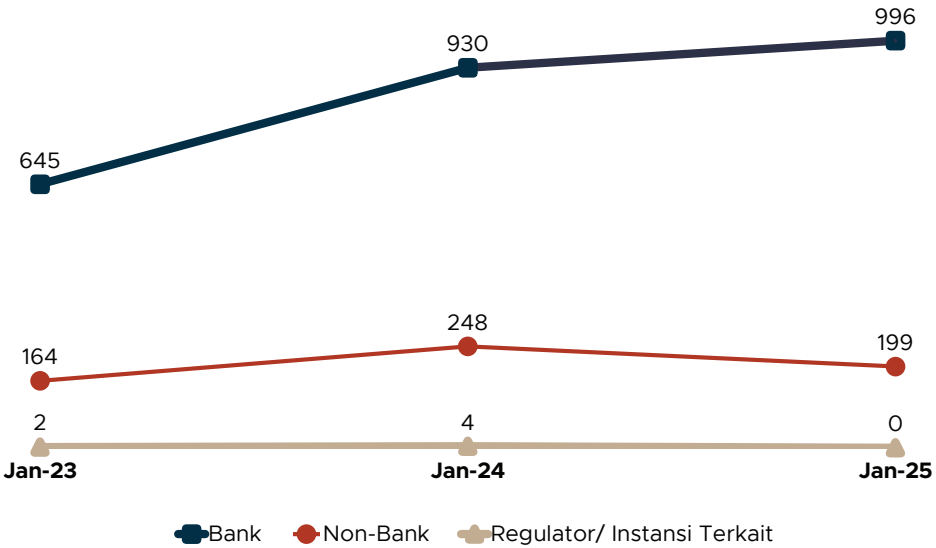
Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil

Tabel 42. Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait Tahun 2023-2025 (s.d. Januari 2025)

Tujuan Permintaan Informasi	2023		2024		2025
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	645	7.990	930	8.361	996
Non Bank	164	3.218	248	2.861	199
Regulator/ Instansi Terkait	2	37	4	13	-
Total	811	11.245	1.182	11.235	1.195

Grafik 18. Perkembangan Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait, Tahun 2023 - 2025 (s.d. Jan 2025)



PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

PERTUKARAN INFORMASI

Antar Financial Intelligence Unit (FIU)

Januari 2025

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, PPATK melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dengan FIU negara lain.

0,0%

Spontaneous Outgoing:

PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

25,0%

Spontaneous Incoming:

PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

16

Pertukaran Informasi

12,5%

Outgoing Request:

PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta

62,5%

Incoming Request:

PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta

Pertukaran
Informasi
bulan ini

=

0,0%

Dibandingkan bulan
Desember 2024
(m-to-m)

≡

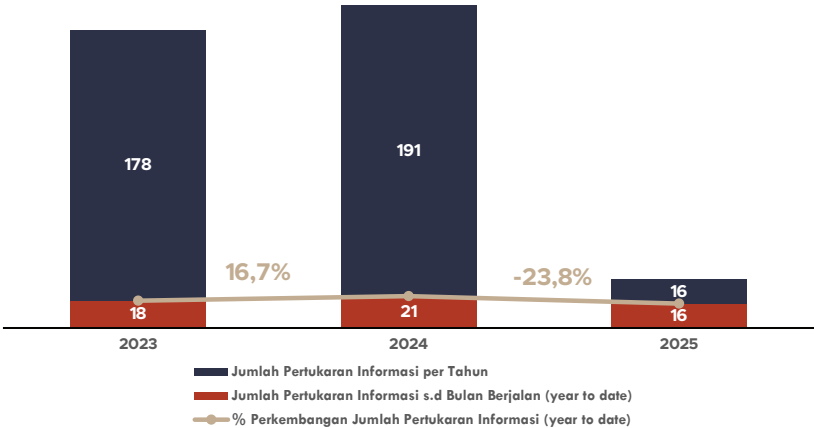
- 23,8%

Dibandingkan bulan
Januari 2024
(c-to-c)

Tabel 43.Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per Bulan

Jenis Pertukaran Informasi	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outgoing Request	56	19	2	1	3	3	2	1	1	2	1	-	1	2	2
Incoming Request	77	107	17	6	8	2	5	7	8	7	9	18	12	8	10
Spontaneous Incoming	24	42	1	7	6	-	-	2	4	3	8	5	2	4	4
Spontaneous Outgoing	21	23	1	7	2	1	-	3	1	2	1	1	2	2	-
Total	178	191	21	21	19	6	7	13	14	14	19	24	17	16	16

Grafik 19. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Jan 2025)



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 89 ayat (1) dan (2)

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 ayat (1)

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional

PUTUSAN PENGADILAN

Terkait TPPU dan TPPT
Januari 2025



Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2023-2025 (s.d Januari 2025)

201 Putusan



Tabel 44. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Provinsi

Provinsi	2023	2024	2025 (s.d. Januari 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2	1	1
Sumatera Utara	1	1	-
Sumatera Barat	-	1	-
Riau	4	-	-
Jambi	-	3	-
Sumatera Selatan	2	9	-
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	-	-
Kep. Bangka Belitung	1	-	-
Kep. Riau	-	1	1
DKI Jakarta	37	49	-
Jawa Barat	6	1	-
Jawa Tengah	5	-	2
DI Yogyakarta	3	-	-
Jawa Timur	6	12	-
Banten	3	2	-
Bali	4	1	-
Nusa Tenggara Barat	-	1	-
Nusa Tenggara Timur	2	-	-
Kalimantan Barat	9	2	1
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	4	2	-
Kalimantan Timur	-	1	-
Sulawesi Utara	-	3	-
Sulawesi Tengah	3	-	-
Sulawesi Selatan	1	5	2
Sulawesi Tenggara	2	1	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	1	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	1	1	-
Papua	-	-	-
Total	96	98	7

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2023 dan 2024



UU No. 8
Tahun 2010

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Tabel 45. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2023	2024	2025 (s.d. Januari 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	13	17	3
Penipuan	12	22	2
Korupsi	25	19	2
Terorisme	5	1	-
ITE	6	9	-
Penggelapan	23	9	-
Perbankan	1	-	-
Transfer Dana	-	-	-
Pencurian	-	-	-
Pemalsuan Surat	4	9	-
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	2	4	-
Penadahan	-	-	-
Bidang Perpajakan	1	-	-
Perjudian	-	-	-
Cukai	-	-	-
Kepabeanan	-	-	-
TPPU	-	8	-
Belum diketahui*	4	-	-
Total	96	98	7

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2023 dan 2024
*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

Tabel 46. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Pasal UU TPPU/ TPPT

Pasal TPPU/ TPPT	2023	2024	2025 (s.d. Januari 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	85	97	7
Pasal 3	69	78	5
Pasal 4	2	-	2
Pasal 5	14	19	-
UU No. 9 Tahun 2013	5	1	-
Pasal 5	5	1	-
Belum diketahui*	6	-	-
Total	96	98	7

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2023 dan 2024
*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

PKA

Pemberian Keterangan Ahli

Januari 2025

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli pada Januari 2025

15 Pemberian Keterangan Ahli

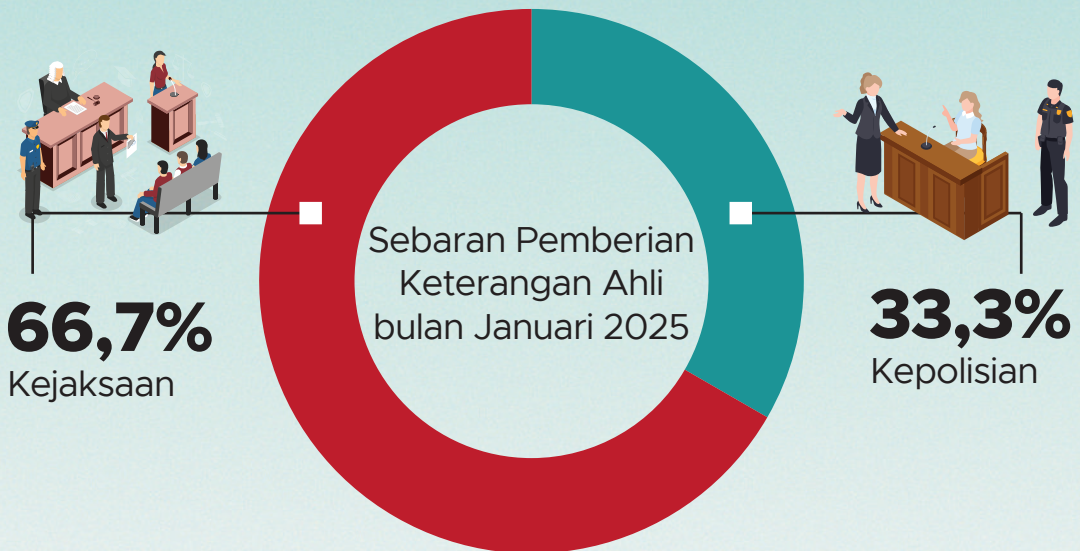
Pemenuhan Keterangan Ahli bulan ini:

✔ **-37,5%**

Dibandingkan
Desember 2024

✔ **-28,6%**

Dibandingkan
Januari 2024



Pemenuhan Keterangan Ahli paling banyak pada Januari 2025 pada tahap

Persidangan

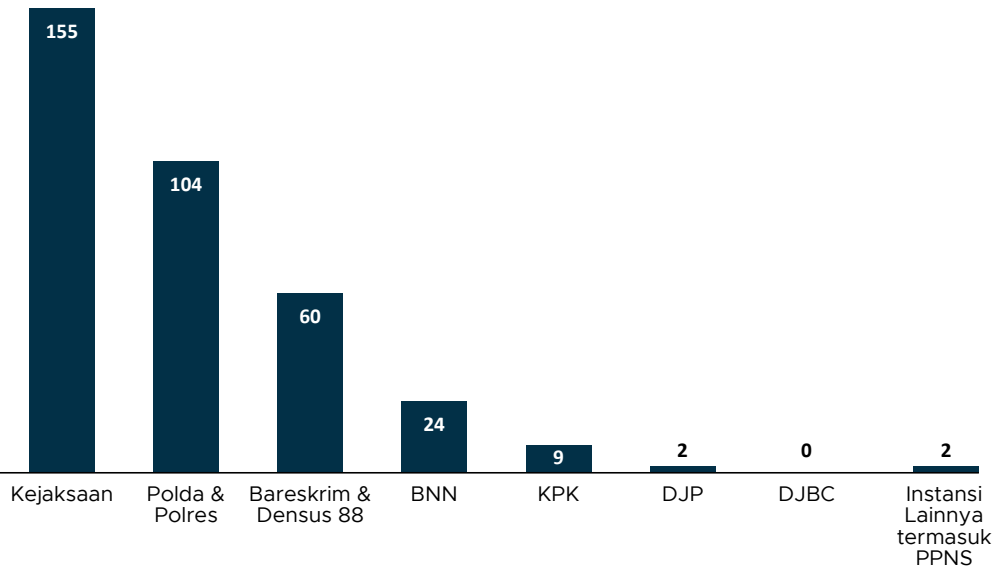
Pemenuhan Keterangan Ahli paling banyak pada Januari 2025 terkait:

ITE/Judi Online

Tabel 47. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon

Instansi Pemohon	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kejaksaan	62	83	6	6	9	8	8	10	7	6	4	7	7	5	10
Polda & Polres	47	54	4	4	3	3	2	4	8	8	2	6	6	4	3
Bareskrim & Densus 88	35	23	1	1	-	-	1	3	2	-	8	3	3	1	2
BNN	12	12	2	2	1	1	3	-	-	1	1	1	-	-	-
KPK	5	4	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
DJP	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instansi Lain	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	163	178	13	15	15	12	15	17	18	15	15	17	16	10	15

Grafik 20. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Tahun 2023 - 2025 (sampai dengan Januari 2025)



PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML
Januari 2025



Distribusi Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang Teregistrasi
Aktif GoAML per Januari 2025

Penyedia Jasa Keuangan Bank
(PJK Bank)

4,2%

Penyedia Jasa Keuangan
Non-Bank (PJK Non-Bank)

11,3%

Penyedia Barang
dan/atau Jasa
(PBJ)

5,3%

Profesi

79,3%

Registrasi Baru Januari 2025

248 Pihak
Pelapor

Penonaktifan Januari 2025

2 Pihak
Pelapor

Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Januari 2025

42.630

Pihak
Pelapor



Pihak Pelapor Bulan Ini

⬆ 0,7%

Dibandingkan Bulan
Desember 2024 (*m-to-m*)

⬆ 4,3%

Dibandingkan Bulan
Januari 2024 (*y-to-y*)

GoAML merupakan Sistem Informasi yang digunakan Pihak Pelapor untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPATK antara lain:

LTKM: Semua pihak pelapor.

LTKT: PJK (Bank dan Non-Bank).

LTKL: PJK (Bank dan Non-Bank)

LT: PBJ dan Profesi

Tabel 48.Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan

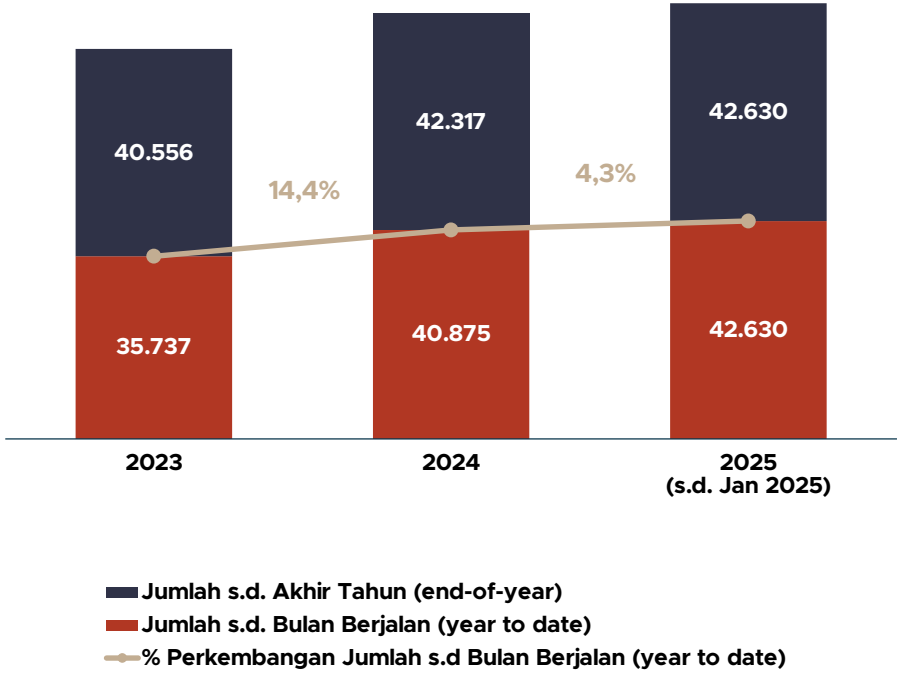
Kelompok Industri	2024												2025
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.958	1.959	1.960	1.963	1.810	1.810	1.814	1.816	1.806	1.809	1.811	1.802	1.806
Bank Umum	112	112	112	112	110	110	109	109	108	108	108	108	108
Bank Perkreditan Rakyat	1.846	1.847	1.848	1.851	1.700	1.700	1.705	1.707	1.698	1.701	1.703	1.694	1.698
PJK Non Bank	3.726	3.758	3.808	3.850	3.840	3.912	4.029	4.327	4.530	4.590	4.674	4.727	4.810
Perusahaan Pembiayaan	180	180	179	179	168	168	168	171	168	170	172	165	165
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	285	286	286	286	281	281	282	308	306	307	307	300	300
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28	28	28	28	26	26	26	26	26	26	27	27	27
Perusahaan Efek	134	134	134	135	132	132	133	133	132	137	137	136	136
Manajer Investasi	98	98	98	98	94	94	95	95	97	99	99	97	97
Kustodian	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	25	27
Wali Amanat	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pedagang Valuta Asing	1.006	1.007	1.007	1.011	992	1.009	1.022	1.026	1.030	1.036	1.055	1.055	1.059
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	50	50	50	50	50	51	51	52	53	56	59	59	60
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	1.334	1.360	1.410	1.442	1.483	1.536	1.633	1.894	1.940	1.967	2.020	2.079	2.146
Pegadaian	38	38	38	38	38	38	38	38	132	134	134	140	141
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	98	98	98	98	96	96	98	88	89	91	91	92	93
Pedagang Aset Kripto	4	4	4	7	7	7	8	18	22	23	24	26	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	220	223	223	225	225	225	225	227	229	233	236	235	235
Perusahaan Modal Ventura	57	57	57	57	51	51	51	51	53	53	54	54	56
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



Pasal 1 ayat (11)
Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

Kelompok Industri	2024												2025
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	47	47	46	46	46	46	46	46	91	96	96	96	97
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	91	92	93	93	94	94	94	95	98	98	99	99	100
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	7	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	8	8	9	9	9	10	10	10	14	14	14	16	18
PBJ	2.093	2.095	2.101	2.106	2.112	2.120	2.128	2.142	2.164	2.195	2.238	2.212	2.224
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.253	1.254	1.259	1.264	1.269	1.273	1.281	1.292	1.317	1.339	1.346	1.344	1.353
Pedagang -Kendaraan Bermotor	457	458	459	459	458	462	462	465	463	470	472	469	469
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	29	30	30	30	30	30	30	30	31	32	32	31	32
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Balai Lelang	115	114	114	114	116	116	116	116	116	117	118	111	112
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	74	74	74	74	74	74	74	74	72	72	72	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	196	184	185
PROFESI	33.098	33.209	33.258	33.291	33.327	33.379	33.424	33.473	33.480	33.546	33.577	33.576	33.790
Notaris	21.153	21.192	21.207	21.217	21.235	21.246	21.253	21.262	21.261	21.265	21.274	21.324	21.514
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.757	10.767	10.775	10.781	10.786	10.792	10.798	10.809	10.808	10.810	10.812	10.817	10.823
Akuntan	401	402	404	407	410	414	418	429	429	466	466	447	450
Akuntan Publik	490	490	490	493	497	509	519	525	527	540	540	484	484
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Advokat	251	312	336	347	353	372	390	402	409	419	439	458	473
Total	40.875	41.021	41.127	41.210	41.089	41.221	41.395	41.758	41.980	42.140	42.300	42.317	42.630

Grafik 21. Perkembangan jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML pada posisi bulan berjalan dan akhir tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir



AUDIT

Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor
Januari 2025

PPATK berwenang melakukan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada Pihak Pelapor (UU Nomor 08 Tahun 2010 Pasal 43)

Audit Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor pada Januari 2025

0

Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.757

Audit



Jumlah Audit

Bulan Ini

✔ **-100,0%**

Dibandingkan bulan Desember 2024 (*m-to-m*)

✔ **-100,0%**

Dibandingkan bulan Januari 2024 (*y-on-y*)

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

0



Profesi

0



Penyedia Barang dan Jasa

0



Tabel 49. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit^{*)} Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Jenis Pihak Pelapor	2005 - 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (s.d. Jan 2025)	Total (2005 - Jan 2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyedia Jasa Keuangan	817	17	20	31	35	25	-	945
Bank	339	8	8	10	10	7	-	382
Perusahaan Pembiayaan	64	1	-	2	-	-	-	67
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	97	1	2	2	-	-	-	102
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	1	-	1	-	-	2
Perusahaan Efek	-	3	3	2	-	-	-	8
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasar Modal ^{**)}	128	-	-	-	-	-	-	128
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	1	-	-	-	-	-	-	1
Pedagang Valuta Asing	144	3	3	5	7	5	-	167
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	1	1	-	2
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	1	-	4	8	7	-	27
Pegadaian	1	-	-	-	-	-	-	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	1	1	2	2	-	6
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	36	-	2	5	6	3	-	52
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyedia Barang dan Jasa	482	48	54	71	79	50	-	784
Perusahaan Properti	335	26	38	50	47	30	-	526
Pedagang Kendaraan Bermotor	132	18	13	18	30	17	-	228

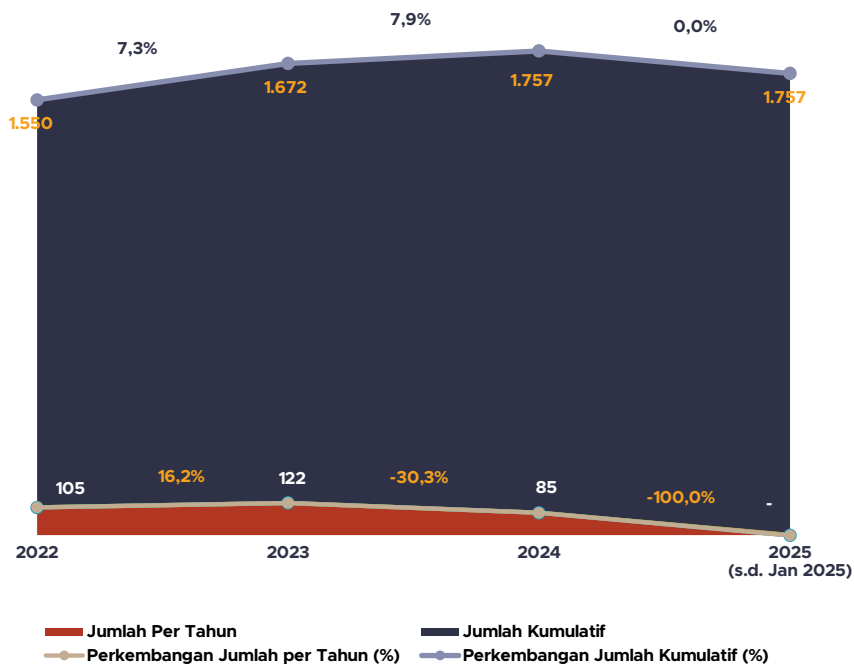
Pedagang Perhiasan/ Logam Mulia	15	-	1	1	-	2	-	19
Balai Lelang	-	4	2	2	2	1	-	11
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	-	1	6	3	8	10	-	28
Total	1.299	66	80	105	122	85	-	1.757
Total Kumulatif		1.365	1.445	1.550	1.672	1.757	1.757	

Catatan:

*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

Grafik 22. Perkembangan Jumlah Audit Per Tahun dan Jumlah Kumulatif Audit Pihak Pelapor Tahun 2022 s.d Januari 2025



Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPAK berwenang:

- melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;"

Grafik 23. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Tahun 2023-2025 (s.d Januari 2025)

Perusahaan Properti	0
Pedagang Kendaraan Bermotor	0
Bank	0
Pedagang Valuta Asing	0
Profesi	0
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	0
Perusahaan Efek	0
Balai Lelang	0
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	0
Perusahaan Pembiayaan	0
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	0
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0

DOKUMEN KERJA SAMA

Januari 2025

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama
antara PPAK dengan FIU/Instansi

1 Dokumen Kerjasama

Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPAK
yang Masih Berlaku s.d. Tahun 2025

Dokumen Kerja Sama
Instansi Dalam Negeri

72

Dokumen Kerja Sama
FIU Negara Lain

58

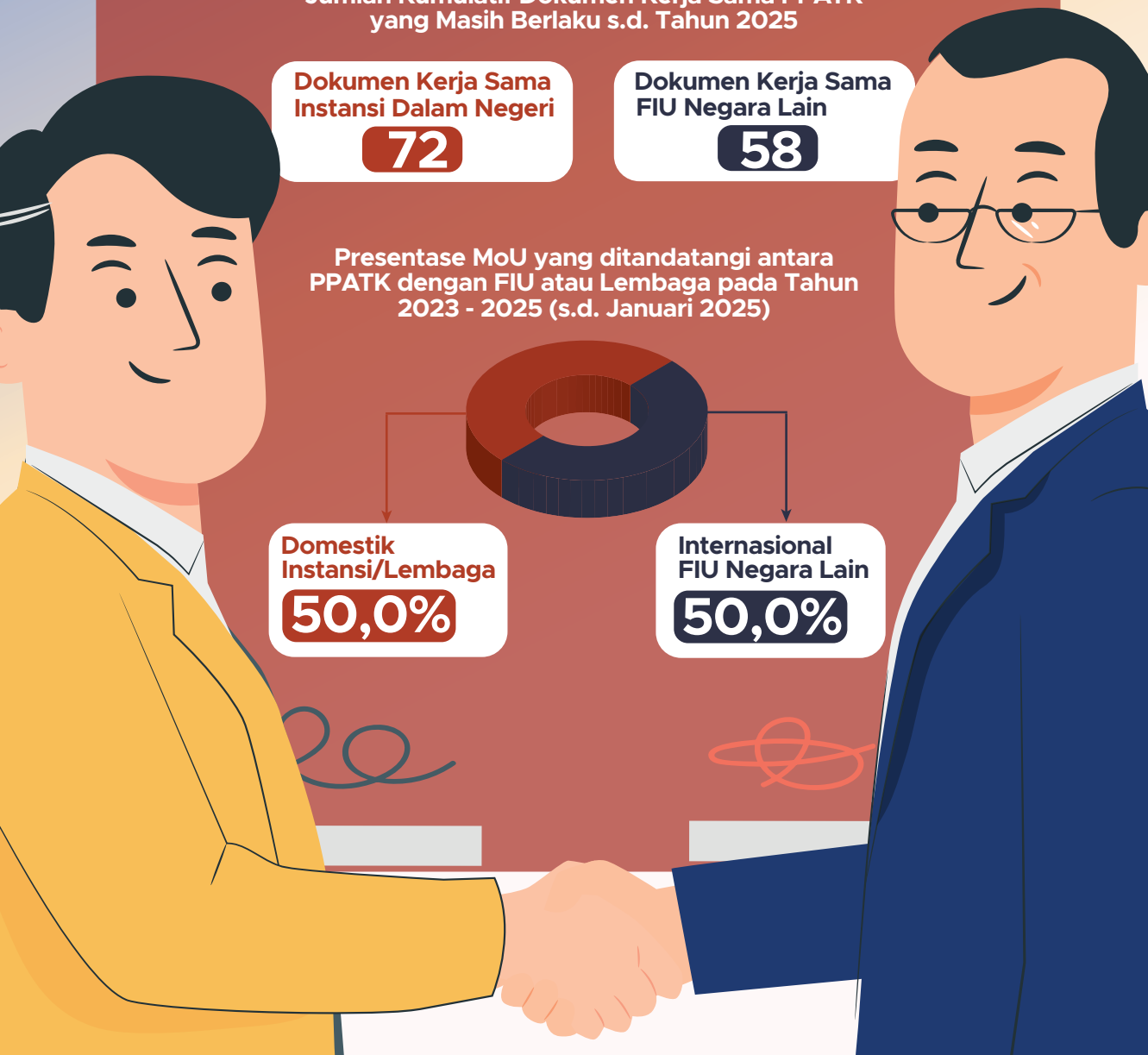
Presentase MoU yang ditandatangani antara
PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun
2023 - 2025 (s.d. Januari 2025)

Domestik
Instansi/Lembaga

50,0%

Internasional
FIU Negara Lain

50,0%



Tabel 50. Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional dan Domestik Berdasarkan Bulan Penandatanganan Tahun 2024 - 2025 (s.d. Januari 2025)

FIU/Instansi	2024												2025
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Internasional (FIU Negara Lain)													
MoU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nasional (K/L, Lembaga Pendidikan, Pihak Pelapor)													
MoU	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1
PKS	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-
Total	1	1	-	-	2	3	1	1	1	1	2	1	1

Tabel 51. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per Januari 2025 Berdasarkan Jenis Dokumen Kerja Sama

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	58	-
Kementerian/Lembaga	41	13
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	116	14



UU No. 8
Tahun 2010

Pasal 90 Ayat 1

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional:

- Instansi penegak hukum;
- Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- Financial intelligence unit negara lain.



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Januari 2025

PPATK melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapabilitas pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT.

Jumlah
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan

2 Pendidikan
dan Pelatihan

Pelaksanaan Diklat
bulan ini

 **100,0%**
Dibandingkan bulan
Desember 2024
(m-to-m)

Jumlah Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan

50 Peserta

 **0%**
Dibandingkan bulan
Januari 2024
(c-to-c)



Tabel 52. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	15	17	-	1	2	1	2	4	-	1	2	3	1	-	-
Pihak Pelapor	18	24	2	1	-	-	3	4	3	2	1	6	2	-	1
Lembaga Pengawas Pengatur	4	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal PPA TK	13	4	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Total	50	47	2	2	3	3	6	8	3	4	3	9	4	0	2

Tabel 53. Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	534	662	-	26	91	69	55	142	-	31	94	120	34	-	-
Pihak Pelapor	618	.067	44	48	-	-	100	197	98	66	62	323	129	-	30
Lembaga Pengawas Pengatur	157	87	-	-	-	57	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal PPA TK	343	119	-	-	20	26	-	-	-	40	-	-	33	-	20
Total	1.652	1.935	44	74	111	152	185	39	98	137	156	443	196	-	50

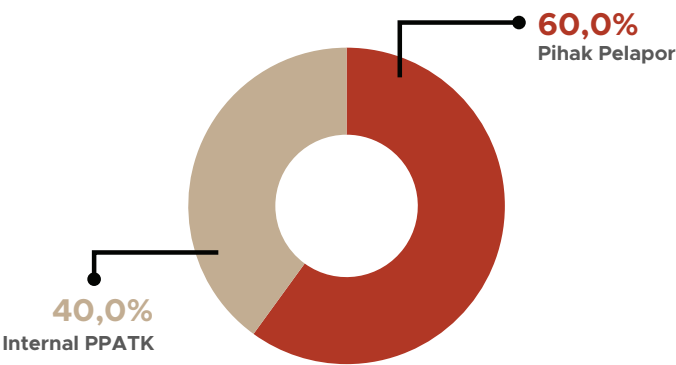
Tabel 54. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2023 - 2025 (s.d Januari 2025)

Pemangku Kepentingan	2023		2024		2025	
	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta	Pelatihan	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	15	534	17	662	-	-
Pihak Pelapor	18	618	24	1.067	1	30
Lembaga Pengawas Pengatur	4	157	2	87	-	-
Internal PPA TK	13	343	4	119	1	20
Total	50	1.652	47	1.935	2	50

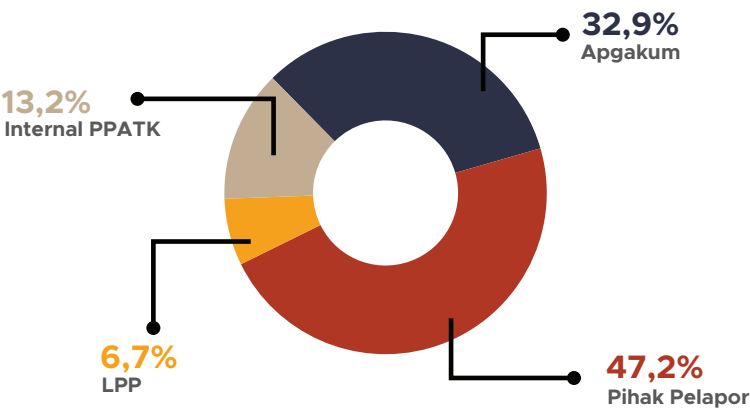


Pasal 40
a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPA TK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

Grafik 24. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2025 (s.d Jan 2025)



Grafik 25. Perbandingan Jumlah Peserta Tahun 2023 - 2025 (s.d Jan 2025)



Tabel 55.Penyelenggaraan Seminar/Webinar Tahun 2023 - 2025 (s.d Jan 2025)

Pemangku Kepentingan	2023 - 2025 (s.d Jan 2025)	
	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
(1)	(2)	(3)
2023	1	650
2024	-	-
2025 (s.d Jan 2025)	-	-
Total	1	650

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

DUMAS

Pengaduan Masyarakat
Januari 2025



PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait tindak pidana pencucian uang (Pasal 2 Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2017)

Pengaduan Masyarakat yang diterima PPATK pada Januari 2025

14
Pengaduan

Jumlah Akumulasi Dumas Sejak 2019

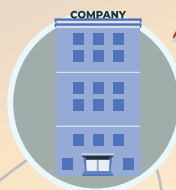
997
Pengaduan

6

Pelapor Individu

8

Pelapor Lembaga



Dibandingkan bulan
Desember 2024
(m-to-m)

↘ **-54,8%**

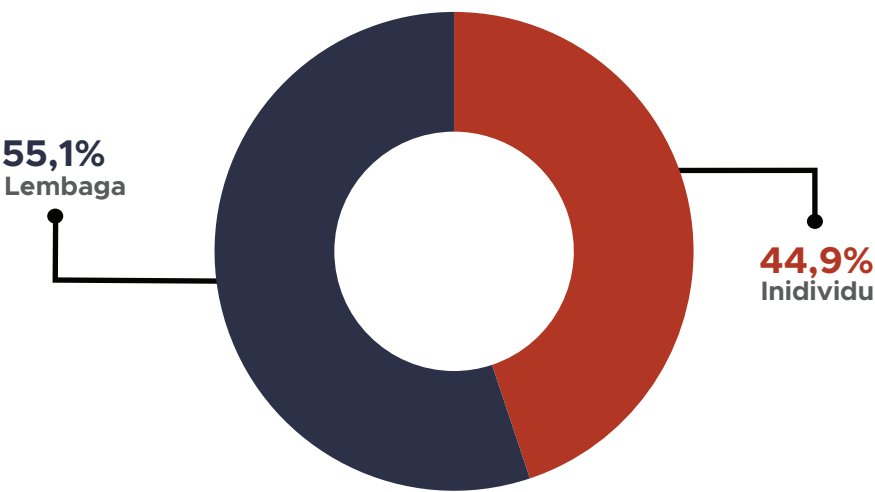
Dibandingkan bulan
Januari 2024
(y-on-y)

↗ **7,7%**

Tabel 56.Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan

Jenis Pelapor	2023	2024	2024												2025
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	95	96	8	5	4	4	9	7	11	9	6	9	6	18	6
Lembaga	115	119	5	29	5	9	12	8	12	5	6	7	8	13	18
Total	210	215	13	34	9	13	21	15	23	14	12	16	14	31	14

Grafik 26. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK berdasarkan Jenis Pelapor 2023 s.d Januari 2025



Perka PPATK
No. 7 Tahun 2019

Pasal 2

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang

BULETIN STATISTIK



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telp. (021) 50928484

Homepage: <https://www.ppatk.go.id>

ISSN 2986-0849

